



VOLUME XI / NO. 106 / JULI 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

LANGKAH TAKTIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Dua belas paket kebijakan yang mendorong deregulasi ekonomi telah diluncurkan.
Dengan memangkas perizinan, birokrasi, dan aturan yang tidak perlu,
roda perekonomian diharapkan berjalan.
Implementasi di lapangan menjadi resep keberhasilan.



Daftar Isi



Foto Cover
Arfindo Briyan

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 13 Deret Regulasi Geret Ekonomi
- 16 Infografis
- 18 Prospektif sejak Aktif
- 21 Gugus Tugas Pengawal Paket Ekonomi
- 23 Paket Kebijakan Gairahkan Industri dan Investasi

REPORTASE

- 25 Menkeu Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PT PII dan Kopelindo
- 26 Kemenkeu Sosialisasikan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

WAWANCARA

- 27 Investasi Syariah: Menenangkan dan Menguntungkan

POTRET KANTOR

- 30 Analisis Akurat Demi APBN Sehat

FIGUR

- 32 Kerja Keras Kerja Tuntas

EKONOMI TERKINI

- 36 Selangkah Lagi Dua Regulasi Disepakati

KOLOM EKONOM

- 40 Peluang ALKI II Menjadi Jalur Global Trade

GENERASI EMAS

- 44 Jatuh Cinta pada Fisika Sejak Remaja

OPINI

- 46 Menggali Potensi Pajak di Era Digital

REGULASI

- 48 Deklarasi Inisiatif Percepat Implementasi Paket Kebijakan

INSPIRASI

- 50 Membumikan APBN

RENUNGAN

- 52 Pandai Beropini

BUKU

- 53 5WIH: Kisah Dian Sastro dan Onlinepreneur Lainnya

KULINER

- 54 Mengejar Lumba-Lumba di Teluk Kiluan

SELEBRITI

- 56 Memaknai Hari Lahir Pancasila

57 BUNG PISKAL

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrif, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



Menilik Implementasi Pelaksanaan Paket

Pada akhir April lalu, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi XII, yang berfokus pada kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan paket ini, kemudahan melakukan bisnis di Indonesia (ease of doing business) ditargetkan naik peringkat, dari peringkat 109 menjadi peringkat 40.

Hingga kini, terdapat 12 paket kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk menggali investasi pada berbagai sektor, sehingga kondisi ekonomi kembali pulih. Dengan melakukan pemangkasan peraturan dan pemberian kemudahan izin usaha dan investasi, ekonomi kita akan tumbuh.

Untuk mengawal paket kebijakan ekonomi ini, Pemerintah lalu membentuk empat kelompok kerja (pokja) untuk mengawal paket kebijakan ekonomi. Pertama, Pokja Kampanye. Kedua, Pokja Penuntasan Peraturan. Ketiga, Pokja Evaluasi (regulatory impact). Keempat, Pokja Penanganan dan Penyelesaian Kasus. Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, masuk pada kategori Pokja Evaluasi. Setiap minggunya, kinerja pokja-pokja ini harus dilaporkan ke Presiden.

Lalu, bagaimana perkembangan implementasi paket kebijakan yang dikeluarkan dari tahun 2015 tersebut? Saat ini, 197 dari 203 peraturan sudah keluar. Artinya sudah terselesaikan

sebesar 96 persen.

Salah satu contoh implementasi paket kebijakan ekonomi, yaitu dibentuknya Pusat Logistik Berikat (PLB). Tujuan pembentukannya untuk mendukung industri domestik agar lebih efisien dengan menurunkan biaya logistik nasional sehingga membuatnya lebih kompetitif.

Saat ini, terdapat sebelas perusahaan yang telah mendapatkan izin PLB. Sebanyak tujuh perusahaan telah melakukan kegiatan operasional pemasukan dan pengeluaran barang. Pemberian izin PLB kepada sebelas perusahaan ini merupakan tahap pertama. Ke depan izin PLB akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan logistik lain yang memenuhi syarat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Tahukah kamu, salah satu realisasi Paket Kebijakan Ekonomi adalah pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB). Dalam pelaksanaannya, PLB berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Apa harapan kamu terhadap ekspor-impor Indonesia?

Lavinafansindo @Aprilia_caniago
harapan saya adlh mnyamkn tarif tuk ekspor impor smua negara shingga kgiatan prdagangan mnjd smkn cepat, persaingan juga sehat

Ade Purba @Adepurba30
indonesia semakin

menguasai perdagangan internasional dan berpengaruh kepada perekonomian dunia

Ade Purba @Adepurba30
industri indonesia tidak kalah saing sehingga ekspor meningkat dan

impor berkurang, penyelundupan berkurang

Gandjar Radzanov @Baharaqis
Semoga Indonesia dpt memanfaatkan kekayaan laut sebagai ekspor andalannya sesuai visi & misi ekonomi kemaritiman

Ralat:
Dalam infografis Media Keuangan Volume XI/ NO.105/JUNI 2016, tidak tertulis sumber data. Seharusnya, sumber data pada bagian Strategi Pembiayaan Infrastruktur adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sedangkan sumber pada bagian Skema Pembiayaan Beberapa Proyek Prioritas adalah Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas per 26 April 2016.

tweet

www.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI Kemenkeu RI kemenkeu

BILLING ONLINE

Importir dapat melakukan pembayaran bea masuk atas transaksi *future trading, royalty, dan proceeds*

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEKLARASI INISIATIF
VOLUNTARY DECLARATION

Kewajiban importir :

- Melakukan pembayaran inisiatif
- Menyerahkan dokumen
- Menatausahakan dokumen



67 / PMK.04 / 2016



Bergerak Kampanyekan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan Spectaxcular, sebuah kampanye pajak yang dikemas dalam lomba lari kekinian di Parkir Barat Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5). Kampanye bertema "Bayarnya e-Billing, Lapornya e-Filing" itu diikuti ribuan orang dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteadi. Grup musik Nidji menjadi salah satu bintang tamu yang memeriahkan acara.

Foto
Arief
Kuswanadji





Foto
Taufik Rahman



Kisah Legenda dari Nusa Tenggara

Dari perbukitan Desa Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, kita bisa melihat sejumlah keindahan lukisan Tuhan. Mata dimanjakan dengan keelokan selat alas yang memisahkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, keagungan Gunung Rinjani, hingga keindahan Pulau Kenawa. Yang istimewa, Desa Mantar juga menyimpan kisah legenda yang dipercaya hingga kini. Sejak ratusan tahun lalu, konon jumlah orang albino di sana selalu berjumlah tujuh. Masyarakat percaya ketika ada albino baru dilahirkan, maka akan ada albino lain yang meninggal.



25/05

Promosikan Inovasi, DJPB Gelar Corner Day Expo 2016

Teks
Biro KLI

Foto
DJPB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan kegiatan Corner Day Expo Transformasi Kelembagaan 2016 selama lima hari mulai tanggal 23 s.d. 25 Mei 2016 di Gedung Yusuf Anwar Kemenkeu, Jakarta. “Expo ini dibuat untuk menginformasikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan perbendaharaan kepada pegawai, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat umum,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam sambutannya.

27/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Dashboard MPN G2 Masuk Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016

Dashboard Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) ditetapkan sebagai salah satu pemenang Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penghargaan Top 35 ini secara simbolis disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada para inovator dari kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Jakarta pada Jumat (27/05).



Kemenkeu Terima Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh peringkat kedua kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik pada tingkat Kementerian/Lembaga dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2016 (BKN Award). Penghargaan kepada Kemenkeu ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto pada Kamis (26/5).

26/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



29/05

Teks
DJP

Foto
DJP

DJP Kampanyekan E-Filing dan E-Billing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Minggu pagi mengadakan kampanye layanan pajak online seperti e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/05). Kampanye terkait pajak ini dimulai dengan lari dengan jarak tempuh 5 kilometer (km) atau 5K di sepanjang kawasan Car Free Day Jalan MH Thamrin pada pukul 06.30 WIB. Kampanye pajak kali ini mengusung tema “Bayarnya e-Billing Laporannya e-Filing.”



Dukung Kemajuan UMKM, Kemenkeu Gelar Dhawafest 2016

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H serta memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Dhawafest 2016. Acara yang diselenggarakan di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta pada 1-3 Juni 2016 ini mengangkat tema ‘Ragam Karya Nusantara dan Kreasi Busana Muslim’. Salah satu rangkaian acara Dhawafest yaitu kegiatan bazar yang diikuti oleh 210 stan UMKM binaan. Bazar ini bertujuan untuk mempromosikan potensi unggulan nusantara dan mendukung kesuksesan UMKM skala kecil.

01/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

06/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

LKPP 2015 Dapat Opini WDP dari BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terungkap saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015 kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Senin (6/6). Dari pemeriksaan atas 86 entitas, secara keseluruhan, BPK mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya menjaga kualitas laporan keuangan.





06/06

Teks
Biro KLI

Foto
DJBC

Gerebek Gudang Narkoba, Bea Cukai dan BNN Sita 45 Kg Sabu-Sabu

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek gudang narkotika berkedok pabrik mi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (14/06). Dari penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Kepala BNN Budi Waseso tersebut, petugas berhasil menyita sembilan batang pipa baja berisi Methamphetamine (sabuduru) seberat 45 kilo gram. Selain itu, petugas juga berhasil menangkap tiga orang bandar narkotika.



20/06

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Bea Cukai Musnahkan Barang Hasil Tindakan Senilai Milyaran Rupiah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan di Kantor Pusat Bea Cukai pada Senin (20/06). Barang hasil penindakan yang dimusnahkan, baik yang telah berstatus Barang Milik Negara dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk dimusnahkan, maupun barang hasil penindakan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dan mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 37.071 botol MMEA impor berbagai merek, 510.600 keping Pita Cukai MMEA Impor Palsu, 1.370 paket Berbagai macam barang larangan dan pembatasan kiriman pos, 5.015 unit handphone dan 15.800.000 batang hasil tembakau dengan total nilai barang sebesar lebih dari Rp46 miliar.

Agenda

15/07 Meeting Request Prof Andrew Teltenstein of Georgia State University (RR Kepala BKF) dengan topic Food and Fuel Sidsidy Reform and Mitigation Measures for the Poor;

19/07 Keynote Speech Seminar mengenai Raskin di Hotel Borobudur;

29/07 Meeting Request - Brett Jenks, CEO RARE, discuss fisheries industry (development planning, national Budgeting, development financing) di RR Kepala BKF;

23-25/07 Raker DJPK.

Laporan Utama



Dampak paket kebijakan terhadap ekonomi sudah dapat dirasakan, salah satunya adalah penguatan sektor industri dalam negeri.

Foto
Githa Adhi Pramana

Deret Regulasi Geret Ekonomi

“Saya akan selalu cek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kabinet terbatas tentang evaluasi paket kebijakan I-XII di Jakarta, Selasa (24/5). Presiden ingin memastikan semua paket ekonomi yang dikeluarkan sudah diimplementasikan. Belum lama ini, kelompok kerja (pokja) secara khusus dibentuk untuk mempercepat sekaligus mengawasi pelaksanaan paket-paket tersebut di lapangan.

Presiden Jokowi menginstruksikan proses *monitoring* dan evaluasi terhadap seluruh program

prioritas, termasuk paket kebijakan, terus dilakukan. “Baik dengan turun ke lapangan, cek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya,” kata dia. Sebagaimana dilansir dari laman www.setneg.go.id, Presiden berharap langkah deregulasi benar-benar memberikan dampak psikologis yang positif, sehingga menguatkan kepercayaan para pelaku ekonomi.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di Kantor Staf

Presiden, Jakarta, Senin (20/6), Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan deret regulasi yang sejauh ini sudah 12 kali diluncurkan utamanya bertujuan mempermudah perizinan usaha dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan deregulasi, berbagai peraturan yang menghambat, bertentangan satu sama lain, hingga yang memperpanjang rantai birokrasi dievaluasi. Deregulasi



bukan hanya mencakup peraturan di pusat, melainkan juga peraturan daerah.

Dalam kondisi perekonomian global yang masih belum bergairah, pemerintah berupaya mendatangkan aliran modal masuk ke tanah air. Di samping mempermudah perizinan, pemerintah juga berupaya terus menyediakan sarana infrastruktur. “Infrastruktur harus lebih dulu kita bangun karena bisa menarik investasi di dalam negeri,” ujar Teten.

Menurut Teten, pokja pemantau implementasi paket kebijakan langsung bekerja setelah dibentuk. Menteri koordinator bidang perekonomian mengetuai pokja tersebut. Tiga wakil ketua pokja terdiri atas menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, sekretaris kabinet, dan Staf Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi. Di samping itu, terdapat unit pendukung pokja di mana sekretaris kementerian koodinator (kemenko) bidang perekonomian menjadi ketuanya dan deputi bidang perniagaan dan industri menjadi wakil ketua.

Dalam pokja tersebut, Teten ditunjuk menjadi Ketua Pokja II dan wakil ketua pokja II dipercayakan kepada menteri sekretaris negara. Sementara pokja I diketuai oleh menteri perdagangan dan wakil ketuanya

adalah kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, pokja III diketuai oleh deputi senior Bank Indonesia, sedangkan Ekonom Raden Pardede terpilih sebagai wakil ketua. Terakhir, pokja IV, dengan ketua menteri hukum dan HAM dan Ekonom Purbaya Yudhi Sadewa menjadi wakil ketuanya. “Di pokja II, kami sudah dua kali rapat. Pada rapat ketiga, kami sudah menyelesaikan beberapa peraturan,” ujar Teten.

Ditemui di tempat terpisah, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Edy Putra Irawady menjelaskan bahwa saat ini tak kurang dari 96 persen peraturan dalam paket kebijakan sudah ditindaklanjuti. “Sebanyak 197 regulasi sudah keluar dari total 203,” kata Edy Putra yang ditemui Media Keuangan di kantornya,

Kamis (16/6). Untuk mengukur implementasi paket kebijakan, pemerintah menggunakan empat indikator, yaitu kepatuhan dari segi jadwal, kesesuaian substansi, dampak terhadap ekonomi, dan banyak atau sedikit persoalan yang terjadi setelahnya. “Semakin menurun kasusnya, itu artinya sukses. Berarti (paket kebijakan yang dikeluarkan) membumi,” ujar dia lagi.

Lebih jauh Edy Putra mengatakan bahwa berbagai paket kebijakan telah mulai dapat dirasakan pengaruhnya terhadap perekonomian. Selain dampak psikologis, indeks kepercayaan konsumen juga mulai meningkat dan daya beli membaik. Yang tak kalah penting, diversifikasi ekspor dan sektor industri juga menggeliat. Ditinjau dari angka pertumbuhan ekonomi, keberadaan paket-paket kebijakan mampu menjadi bantalan penyokong pertumbuhan.

Sambutan positif

Dalam sudut pandang pengamat, Kiki Verico, Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menilai positif cara pemerintah mengelola ekonomi dengan menerbitkan paket-paket kebijakan dan membentuk pokja. “Paket-paket tersebut adalah respons dari permasalahan di lapangan,” kata Kiki kepada Media Keuangan, Rabu (15/6).

Salah satu filosofi dasar yang paling penting dari kebijakan adalah implementasi. Menurut Kiki, kinerja pokja harus dapat diukur

pada kemampuannya memahami persoalan secara menyeluruh. “Pokja harus mampu melihat hubungan antara satu paket dengan paket lainnya, menyadari skenario hubungan di antaranya, dan memiliki kemampuan mendeteksi resiko dari setiap hubungan yang ada,” ujar dia. Di samping itu, yang juga penting bagi pokja adalah mengetahui siapa yang akan terkena dampak, baik manfaat maupun biaya dan mampu mengadvokasi dampak resiko yang terjadi. Untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan baik di lapangan, Kiki melanjutkan, dibutuhkan rangkaian aktivitas pengawasan dan evaluasi. “Setiap kebijakan yang baik membawa *net benefit* hingga jangka waktu panjang,” tuturnya lagi.

Apresiasi terhadap pembentukan pokja juga datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman. Menurutnya, pokja perlu menunjukkan secara terbuka hambatan yang masih ada terkait dengan penerapan paket kebijakan. “Baik hambatan kelembagaan dan regulasi terkait, maupun hambatan pejabat tertentu. Kemudian ambil langkah cepat untuk mengatasi hambatan itu,” kata Eddy Suratman.

Di samping itu, pokja juga harus mampu berkomunikasi sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menduplikasi paket-paket kebijakan sesuai dengan kewenangan. Paket-paket kebijakan itu dipandang tidak akan optimal jika daerah tidak menindaklanjutinya dengan penyederhanaan kebijakan untuk mengatasi hambatan investasi dan ekonomi. “Apalagi sejak 2001, kita sudah menjalankan kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan sebagian besar kewenangan pada pemerintah daerah,” ujar Eddy Suratman.

Hambatan investasi, izin usaha, dan birokrasi sebagian besar juga ada di daerah. Deregulasi peraturan-peraturan daerah tak bisa dihindari. Menurut Eddy Suratman, masalah utama terkait implementasi paket kebijakan salah satunya karena pemerintah pusat tidak berada dalam frekuensi yang sama dengan pemerintah daerah. “Pemerintah pusat kelihatannya cepat dan sungguh-sungguh, tapi sebagian besar daerah tampak santai saja seolah tidak ada masalah,” katanya.

Persepsi dunia internasional

Di samping sambutan positif dari dalam negeri, paket-paket kebijakan juga memperbaiki persepsi dunia internasional terhadap pengelolaan ekonomi tanah air. Hal ini antara lain tampak dari makin derasnya investasi masuk ke Indonesia. “Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menarik modal asing melalui penjualan surat utang di Jepang dan Eropa menunjukkan hasil yang bagus. Ini menggambarkan tingginya kepercayaan asing terhadap pengelolaan ekonomi nasional,” kata Eddy Suratman. Namun demikian, jika pemerintah daerah tidak melakukan langkah yang sama dengan pusat, dia khawatir manfaat dari kepercayaan asing ini hanya berlangsung dalam jangka pendek, sekitar satu hingga dua tahun.

Hal senada juga disampaikan oleh Kiki. Kebijakan Presiden Jokowi menerbitkan paket-paket

kebijakan telah membuat perbedaan cara pandang dunia internasional terhadap Indonesia. Pemerintah dilihat telah menjalankan banyak perubahan yang signifikan, terutama sejak krisis keuangan Asia periode 1997-1998. “Menurut saya tingkat kepercayaan dunia internasional pada komitmen reformasi Indonesia jauh lebih tinggi,” kata Kiki. Pemerintah, Kiki menambahkan, harus mampu membuktikan setiap kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi dunia usaha, mendorong daya saing nasional, dan sejalan dengan keterbukaan yang adil dan tidak diskriminatif.

Akan berlanjut

Sebagai kumpulan kebijakan lintas sektor, Kemenkeu mendorong keberhasilan implementasi keseluruhan paket kebijakan. Dalam pokja, menteri keuangan terlibat sebagai anggota pokja II. Menurut Juru Bicara Kemenkeu Luky Alfirman, pelaku pasar dan investor menyambut baik keberadaan paket kebijakan. Dalam beberapa kesempatan diskusi dengan analis dan pelaku usaha, Luky melanjutkan, mereka sempat bertanya mengapa pemerintah seolah mencil paket kebijakan dan mengeluarkannya secara berkala.

Berdasarkan pengalaman pemerintah sebelumnya, membuat paket kebijakan yang mencakup banyak hal justru membuatnya menjadi kurang fokus. “Jadi lebih baik yang sudah dilakukan sekarang. Itulah strategi dari Presiden yang diterjemahkan oleh Menko Perekonomian,” kata Luky. Dengan mengeluarkan paket secara bertahap dan tematik, pemerintah dinilai bisa lebih fokus.

Baik Edy Putra maupun Teten menegaskan pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan deregulasi ke depan. Berbagai paket kebijakan pun masih akan diterbitkan. Menurut Edy Putra, pemerintah ingin memperbaiki iklim persaingan usaha, standar usaha, dan penemuan baru. Di samping itu, paket-paket kebijakan yang akan datang juga akan difokuskan untuk mempermudah urusan logistik dan konektivitas.

Hal lain yang menjadi pokok perhatian adalah upaya untuk memperbaiki sektor industri dan mendukung pembiayaan alternatif. “Saya ingin mengatakan deregulasi ini tidak akan tuntas. Namun, hal yang paling kami kejar adalah membuat fundamental yang *sustain*,” kata Edy Putra. Fundamental yang dimaksud mencakup penataan perizinan dan pelayanan publik.

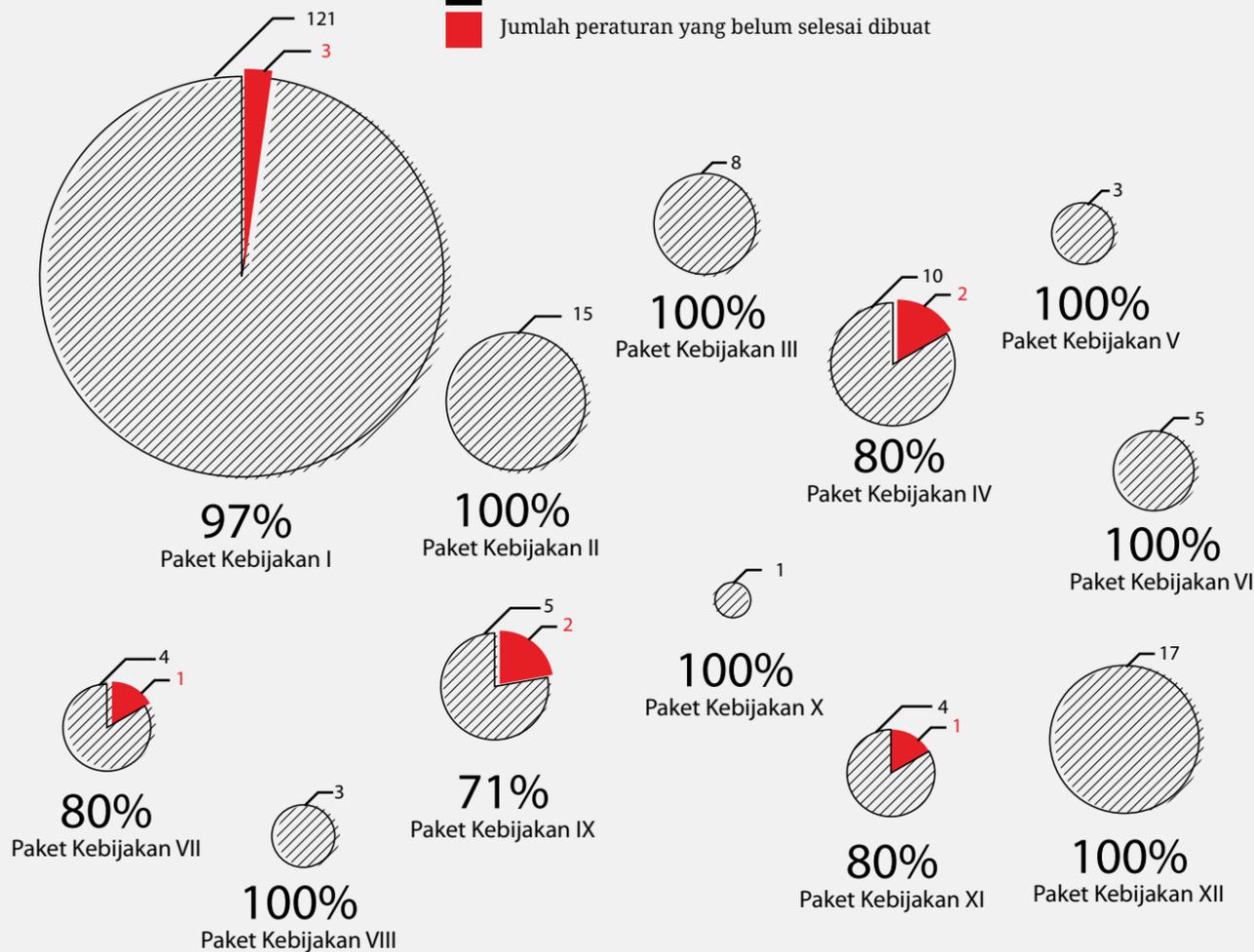
Teks Dwinanda Ardhi

Mengintip Tindak Lanjut Paket Kebijakan

Sejak Oktober 2015, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan tidak kurang dari 12 paket kebijakan. Upaya ini dilakukan demi memberikan stimulus positif bagi perekonomian Indonesia. Menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bersama memantau perkembangan ke-12 paket kebijakan agar berjalan sesuai harapan.

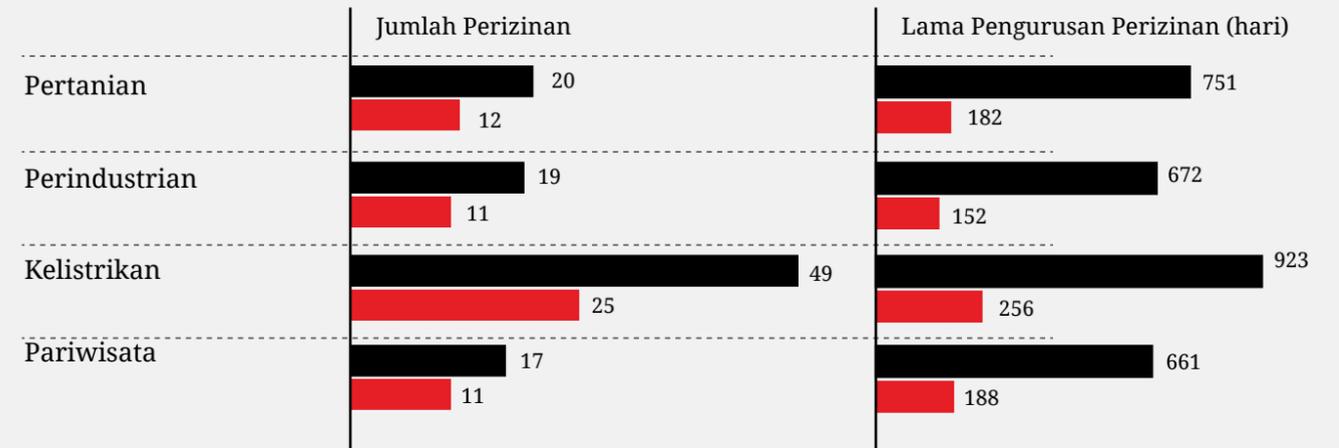
Penyelesaian Rencana Peraturan

Jumlah peraturan yang selesai dibuat
 Jumlah peraturan yang belum selesai dibuat

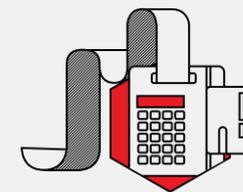


Pemangkasan Waktu Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Sebelum
 Sesudah

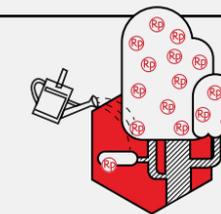


Perkembangan Lain



Perdagangan

Mengintegrasikan Semua Pelayanan Perizinan ekspor/impur secara elektronik pada 15 K/L yg meliputi 18 unit perizinan



Fiskal

Jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday* dari 5-10 tahun menjadi 5-15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menkeu



Perbankan

Target KUR semula 30 triliun menjadi 120 triliun dengan besaran bunga semula 19% menjadi 12%

Pembentukan 4 Gugus Tugas (Task Force) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

- Task Force Percepatan Penyelesaian Peraturan (dipimpin KSP)
- Task Force Identifikasi Hambatan, Masalah, dan Kasus (Kemenko Polhukam)
- Task Force Evaluasi Pelaksanaan dan Analisis Dampak Paket Kebijakan (independen/nonpemerintahan)
- Task Force Sosialisasi, Publikasi, dan Diseminasi Paket Kebijakan (BKPM dan Mendagri).

sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prospektif sejak Aktif



Keputusan membentuk Pusat Logistik Berikat di tanah air dinilai menjanjikan. Sejak diresmikan, turunya biaya logistik nasional sudah terasa dekat di depan.

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan pada peresmian PLB.

Foto M. Ardani

Terdengar suara tumbol berbunyi nyaring dan panjang di kawasan Industri Krida Bahari, Cakung, Jakarta, Kamis (10/3) lalu. Ini pertanda sebelas Pusat Logistik Berikat (PLB) di tanah air mulai resmi beroperasi. Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjadi saksi sejarah peresmian PLB tersebut.

“Setiap detik, setiap menit, setiap jam, kompetisi itu harus kita hadapi. Sudah tidak ada waktu lagi. Semuanya harus dihadapi dengan kerja keras. Dihadapi dengan membangun sistem yang lebih efisien,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id. Di tengah perubahan dunia yang semakin ekstrim dan cepat, kompetisi dan persaingan menjadi hal yang mendasari Jokowi untuk melakukan perubahan di tanah air.

Salah satu upaya melakukan perubahan tersebut tertuang dalam paket kebijakan ekonomi tahap kedua yang fokus untuk meningkatkan investasi. Terdapat satu poin didalamnya mengenai pembentukan kawasan PLB. Tujuannya untuk mendukung industri domestik agar lebih efisien dengan menurunkan biaya logistik nasional sehingga membuatnya lebih kompetitif.

Berdasarkan data World Bank, biaya logistik di Indonesia mencapai angka 26,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai lebih tinggi dibanding negara-negara lain, seperti Malaysia (15%), Jepang (10,6%), dan Amerika Serikat (9,9%). Bahkan rata-rata biaya logistik negara di Eropa hanya berkisar 8 hingga 11 persen dari PDB. Disamping itu, Logistic Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 53, posisi ini ternyata masih di bawah Malaysia pada peringkat 25 dan Singapura pada peringkat 5.

Sejumlah hal yang menyebabkan belum efisiennya biaya logistik di Indonesia diantaranya, yaitu *dwelling time* (waktu bongkar muat barang impor di pelabuhan sampai dikeluarkan dari pelabuhan). Sebagai contoh, waktu *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 4,7 hari (sekarang sudah 3,9 hari) sementara *dwelling time* di Singapura hanya 1 hari.

Kedua, adanya tambahan biaya penimbunan di luar negeri yang dikenakan pada barang keperluan industri sebelum diimpor ke Indonesia untuk langsung digunakan. Ketiga, adanya tambahan biaya

penelusuran teknis di luar negeri terhadap barang-barang tertentu yang akan diimpor ke Indonesia.

Selama ini terjadi penumpukan atau *inventory* barang keperluan manufaktur domestik di luar negeri yang membuat harga melonjak. Dengan pendirian PLB maka perusahaan tidak perlu lagi melakukan impor bahan baku, barang modal maupun bahan penolong dari negara lain karena barang itu sudah tersedia di dalam negeri. Pada akhirnya PLB mampu mendekatkan ketersediaan barang-barang untuk keperluan industri di dalam negeri (termasuk juga Industri Kecil dan Menengah).

Dengan PLB pemerintah juga memberi kemudahan fasilitas perpajakan. Kemudahan itu berupa penangguhan pembayaran bea masuk bagi perusahaan yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan tersebut juga dibebaskan dari pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kemudian, bagi perusahaan yang ingin masuk kawasan PLB, pemerintah juga membebaskan pembayaran cukai.

Pemerintah juga tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya. Kebijakan pembebasan PPN dan/atau PPnBM berlaku pula untuk barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean maupun dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menekankan agar fasilitas PLB ini dapat dioptimalkan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan pasokannya. Ke depan, Bambang berharap cita-cita besar Pusat Logistik Berikat sebagai hub logistik nasional dan regional di Asia Pasifik dapat terwujud.

“Pemberian izin PLB kepada sebelas perusahaan saat ini baru tahap pertama, ke depan tentunya izin PLB akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan logistik lain yang memenuhi syarat,” ujar Menkeu seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id. Selain memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan, setiap perusahaan yang ingin mendapatkan izin PLB harus memenuhi prinsip modern, luas, dan otomatisasi.

Modern berarti perusahaan menerapkan prinsip manajemen modern dalam mengelola barang serta

memiliki Sistem Pengendalian Internal. Luas berarti perusahaan yang mengajukan izin PLB harus memiliki lahan minimal 1 hektar. Sementara otomasi berarti perusahaan wajib mendayagunakan *information technology inventory* dan cctv yang dapat diakses secara *online* dan *realtime* dari kantor bea cukai maupun kantor pajak.

Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Robi Toni, dari sebelas perusahaan yang telah mendapatkan izin PLB tahap pertama, tujuh perusahaan telah melakukan kegiatan operasional pemasukan dan pengeluaran barang. Sementara empat perusahaan lainnya belum melakukan kegiatan operasional karena masih menunggu realisasi kontrak dengan *customer*.

Selain itu, kini waktu bongkar muat atas barang yang dimasukkan ke PLB dinilai menurun dibanding sebelumnya, “terjadi penurunan *dwelling time* yaitu *same day*. Artinya barang dikeluarkan dari pelabuhan setelah turun dari kapal dan keluar pelabuhan di hari yang sama. Harapan kami juga terjadi penurunan biaya penelusuran teknis di luar negeri karena dapat dilakukan di PLB,” ujar Robi.

Robi menjelaskan bahwa tantangan terbesar dari implementasi PLB ialah sinergi dan infrastruktur. Terkait sinergi, Robi berharap seluruh lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah maupun pihak swasta dapat bekerja sama menyukseskan pelaksanaan PLB. Selanjutnya terkait infrastruktur, Robi yakin bahwa tujuan PLB akan mudah terwujud jika didukung

infrastruktur yang memadai, terutama infrastruktur pelabuhan maupun akses dari pelabuhan ke PLB.

“DJBC menginisiasi *Indonesia Single Risk Management*, agar seluruh jajaran pemerintah satu suara untuk melihat risiko terhadap satu perusahaan yang sama. Terkait sinergi dengan pihak swasta, DJBC melakukan asistensi kepada pengguna jasa. Tidak boleh ada pikiran dari pihak swasta memanfaatkan PLB justru untuk pelarian keuangan negara (melarikan diri dari kewajiban perpajakan),” jelasnya.

Apresiasi

Dari sisi eksternal, tiga asosiasi seperti Asosiasi Pusat Logistik Berikat Indonesia (APLBI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sama-sama mendukung pembentukan PLB. Ketiga asosiasi tersebut mengapresiasi kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan melalui DJBC sebagai salah satu pengelola PLB.

Ketua ALI, Zaldy Ilham Masita menuturkan bahwa Kementerian Keuangan membuat sejarah baru dengan PLB. “Perubahan ini sangat mendasar dan perlu dikawal sampai jangka panjang. Jangan sampai ‘layu sebelum berkembang’. Dengan PLB ini, mengubah struktur ekonomi - logistik Indonesia dan ASEAN. Bila sebelumnya Indonesia hanya menjadi satelit dari pusat logistik ASEAN di Singapura tapi sekarang (bisa) menjadi *Center*,” tuturnya.

Sementara itu, setelah tiga bulan diresmikan, Ketua Umum APLBI, Ety Puspitasari merasakan

bahwa kini proses *clearance* barang keluar dari pelabuhan maksimum dua hari. “Proses (administrasi) kepabeanan bisa (selesai) dalam hari yang sama, sesuai yang dicanangkan. Asistensi tim bea cukai juga responnya cukup cepat. Kendalanya sistem belum stabil, tapi lumrah proses transisi. *During the process* makin membaik,” ungkapnya.

Disisi lain, Ketua Umum ALFI, Yuki Nugrahawan Hanafi mengusulkan agar pemerintah lebih fokus. “Sebelum menjadi PLB di ASEAN atau bahkan Asia-Pasifik, ini aja dulu (*inventory* barang) yang selama ini dikelola di luar bisa dipindahin ke sini (Indonesia). Kalau saya mendorong bagaimana kita menjadi tuan rumah dulu di negara sendiri. (Selain itu) Harus dipertimbangkan komponen transportasi serta infrastruktur menuju PLB dan keluar PLB menuju pabriknya,” usulnya.

Ketiga ketua asosiasi tersebut senada berpendapat bahwa PLB dinilai lebih efektif bukan ditentukan dari berapa banyak perusahaan yang diberikan izin melainkan ditentukan dari titik sebaran PLB. Ketiganya sepakat bahwa sebaiknya lokasi PLB tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa tetapi juga harus tersebar hingga ke wilayah timur Indonesia. Terkait produk komoditas, mereka berharap pemerintah tak hanya memfasilitasi komoditas bahan baku tetapi juga dapat memfasilitasi komoditas barang jadi untuk dapat masuk PLB, seperti di negara tetangga.

Ke depan, ketiganya optimis melihat prospek investasi di Indonesia sangat tinggi karena sejumlah pemain logistik luar mulai melirik Indonesia. “Singapura mulai menurunkan biaya sewa, berarti mereka melihat kita dari segi ancaman. So, we are in the right track,” kata Ety, ketua APLBI. Meskipun demikian, ketua umum ALI, Zaldy menambahkan agar pemerintah tetap harus menjalin kerja sama dengan mereka untuk *sharing knowledge* dan pengalaman mengelola PLB.

Terakhir, ketua ALFI, Yuki mendorong agar pemerintah melakukan empat *logistic reform* yaitu harmonisasi regulasi, optimalisasi infrastruktur, reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk sumber daya manusia. “Saya juga mendorong pemerintah untuk memutuskan siapa kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap logistik dan *supply chain*,” terangnya.

Teks lin Kurniati



Laporan Utama

Riuh rendah pasar tradisional, urat nadi ekonomi.

Foto Arief Kuswanadji

Gugus Tugas Pengawal Paket Ekonomi

Agar rangkaian paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah berjalan dengan lancar, pada akhir Mei lalu Presiden Jokowi membentuk *task force* atau gugus tugas yang akan memantau pelaksanaan paket kebijakan.

Dalam arahnya, presiden menegaskan bahwa pemantauan akan dilakukan terus menerus, mulai dari sisi prosedur hingga kondisi nyata di lapangan.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan, perangkat gugus tugas tersebut akan mengambil peran untuk memastikan implementasi Paket kebijakan ekonomi berjalan dengan semestinya hingga ke daerah. Selain itu, mereka harus mengambil langkah penyelesaian apabila menemui kendala. Sebagai tambahan, tim gugus tugas juga bertugas menyebarluaskan serta mengelola informasi terkait paket kebijakan ekonomi.

Ada 4 kelompok kerja (Pokja) di dalam gugus tugas tersebut. Pokja I yang dipimpin Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, bertugas melakukan kampanye dan diseminasi kebijakan. Pokja II bertugas melakukan percepatan dan penuntasan regulasi dan diketuai oleh Kepala Staf Khusus Presiden, Teten Masduki.

Pokja III akan melakukan evaluasi dan analisa dampak dibawah pimpinan Deputy Senior Bank Indonesia, Raden Pardede. Terakhir, Pokja IV yang diketuai Menteri Hukum dan HAM, Luhut Panjaitan mendapat mandat untuk menangani dan menyelesaikan kasus. Seluruh Pokja akan melaporkan setiap perkembangan paket ekonomi langsung kepada presiden setiap minggu.

Deputi V Menko Perekonomian Edy Putra Irawady menuturkan, kegiatan Pokja I adalah untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada dunia usaha serta investor dalam dan luar negeri. Pokja ini akan menggunakan bahasa ekonomi yang lebih sederhana dan membumi sehingga lebih mudah dipahami. "Tim ini nantinya akan melakukan *roadshow* untuk bertemu para pemimpin perusahaan, merayu para investor, serta meyakinkan mereka bahwa investasi di Indonesia mudah dan menguntungkan," jelas Edy

Pokja II yang menangani penuntasan peraturan dibentuk untuk mempermudah perijinan usaha dan investasi. Teten Masduki mengatakan, Pokja yang dipimpinnya akan menyederhanakan perijinan dengan memotong aturan yang tidak perlu, termasuk di tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu, Pokja II juga akan

mempercepat harmonisasi regulasi yang saat ini masih banyak tumpang tindih. "Kami juga perlu mengkaji kembali substansi dari sebagian regulasi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan. Akhir Juni ini kami harus menyelesaikan 26 aturan lagi dari total 203," jelas Teten.

Selanjutnya, Pokja III Evaluasi dan Analisa Dampak hadir untuk secara kritis menilai dampak positif dan negatif dari kebijakan yang telah diluncurkan. Analisis pengaruh paket kebijakan akan diserahkan kepada tim yang berasal dari luar pemerintahan, khususnya pelaku usaha dari beragam sektor. Dikatakan Edy, anggota Pokja ini akan melihat fakta di lapangan yang menunjukkan sejauh mana paket kebijakan memberikan dampak langsung pada perekonomian.

"Sekarang daya beli masyarakat naik *enggak*? Daya saing industri naik *enggak*? Investasi meluas dan berkualitas *enggak*? Ekspor kita mulai menggeliat *enggak*? Pariwisata kita semakin ramai *enggak*? Penggunaan devisa kita berkurang *enggak*? Itu kan yang kita lihat" tegas Edy. Pokja ini juga bertugas menampung, menyeleksi, serta menelaah usulan-usulan baru terkait regulasi dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh dunia usaha.

Penegakan hukum menjadi aspek lain yang sama pentingnya dalam pembenahan ekonomi. Dijelaskan Edy, kepastian hukum adalah keharusan untuk dunia usaha sehingga diperlukan adanya *damage control*. "Ada saja perusahaan dan aparat yang melanggar peraturan. Selain itu, banyak juga rongrongan dari oknum organisasi masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal seperti ini *kan* sangat mengganggu", ujar Edy. Untuk mengentaskan hal tersebut, Pokja IV yang akan menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi. Tim ini juga bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan deregulasi.

Ekonom Universitas Udayana, I Komang Gde Bendesa mengatakan, pemantauan yang dilakukan oleh gugus tugas hendaknya sampai pada lembaga yang akan mengeksekusi kebijakan. Dengan begitu, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti. Di sisi lain, hasil kerja gugus tugas akan sangat bergantung pada kualitas evaluasi serta justifikasi yang digunakan. "Mungkin beberapa kementerian terkait tahu adanya kebijakan tertentu, namun hanya sebatas mengenal saja. Sebab itu, harus ada koordinasi yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan", kata Bendesa.

Teks Irma Kesuma

Paket Kebijakan Gairahkan Industri dan Investasi

Edy Putra Irawady.

Foto Bagus Wijaya



Demi menggerakkan aktivitas perekonomian, Pemerintah telah meluncurkan Paket kebijakan ekonomi. Hingga saat ini telah ada 12 Paket kebijakan ekonomi yang saat ini terus digaungkan di masyarakat. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu tak lepas dari perkembangan dunia industri, perdagangan, dan investasi. Untuk mendalami pembahasan tersebut, simak wawancara Media Keuangan dengan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (Deputi V), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady.

Bagaimana implementasi Paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII saat ini?

Untuk mengukur suatu kebijakan itu harus ada ukuran yang jelas. Implementasi kebijakan ini terbagi menjadi empat bagian. Pertama, kesesuaian peraturan dengan jadwal. Saat ini, 96 persen dari total 203 regulasi paket kebijakan ekonomi sudah keluar. Artinya, 197 regulasi sudah terselesaikan. Kedua, keselarasan substansi.

Ketiga, dampak kebijakan terhadap perekonomian. Kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu jauh dari target karena konsumsi masyarakat menurun. Supaya tidak menjadi lebih parah, kita melakukan *countercyclical* (pembalikan siklus ekonomi yang sedang menurun ke arah lebih positif). Sektor fiskalnya kita jaga, kebugaran fiskalnya jangan diganggu. Keempat, timbulnya permasalahan dari kebijakan. Semakin menurun kasus permasalahan, berarti kebijakan itu bisa dikategorikan sukses.

Sebenarnya apa yang diharapkan dengan pemberlakuan Paket kebijakan ekonomi?

Sejak September 2015, kita memulai apa yang ingin dikejar. Pertama, meningkatkan daya saing industri. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Ketiga, memperluas investasi, khususnya di luar pulau Jawa. Keempat, meningkatkan ekspor.

Sebagai Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, bagaimana Anda memandang kondisi daya beli masyarakat saat ini dan produktivitas ekspor yang menurun?

Penyebab kuat merosotnya pertumbuhan adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menurun menandakan kondisi rawan, karena 55 persen pertumbuhan itu berasal dari konsumsi masyarakat. Pada saat itu kita mencoba mempercepat konsumsi pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi hanya bisa menyumbang 11 persen saja.

Ekspor kita ini seperti demam, kadang panas kadang dingin. Kadang memberikan surplus, kadang memberikan defisit. Kita tidak pernah melampaui 1 persen dari *share* impor dunia. Hal ini karena barang impor kita kebanyakan barang mentah, barang yang dikasih Tuhan dan tidak diolah. Maka ekspor kita tidak mempunyai daya saing.

Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri?

Kementerian Keuangan sudah menggunakan APBN untuk memberikan insentif, memberikan proteksi tarif, dan memberikan proteksi tata niaga. Namun kondisinya saat ini sudah parah, daya saing ekspor kita sudah parah. Ibaratnya, sudah tidak bisa bersaing lagi di liga.

Menurut saya, banyak sekali tindakan kita ini yang mubazir (terbuang sia-sia). Berapa banyak kita memberikan bea masuk ditanggung pemerintah. Berapa banyak kita melakukan perlindungan *dumping* dan melakukan kenaikan tarif. Berapa sering kita melakukan tata niaga perlindungan. Semuanya tidak mampu mendorong daya saing. Itu kekhawatiran kita saat ini.

Dengan diluncurkannya berbagai paket kebijakan, apakah telah didukung pula dengan pembangunan infrastruktur yang memadai?

Kita ingin paket kebijakan bisa menggerakkan perindustrian di Indonesia. Dalam hal ini, infrastruktur memegang peranan penting. Kita tidak mungkin membuat listrik di seluruh Indonesia langsung jalan karena tidak ada biaya. APBN kita terbatas. Untuk itu, saat ini kita memberikan obat dan suplemen dulu. Obat berupa deregulasi kita kasih dulu biar (perindustrian kita) 'sembuh'.

Setelah itu baru kita kasih suplemen berupa Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kawasan Ekonomi Khusus. Kita ingin membuat kawasan industri sebagai *supply chain*. Untuk itu, harus ada intervensi pemerintah. Pemerintah wajib membuat jalan akses. Pemerintah juga bisa memberikan langsung pembuatan transmisi listrik di dalam kawasan industri, tidak perlu pakai izin PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Beberapa waktu lalu, Presiden RI telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Pelaksanaan Paket kebijakan ekonomi. Bagaimana kinerja Pokja tersebut sejauh ini?

Pokja ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha. Intinya, Presiden menugaskan Menko Perekonomian untuk membentuk satuan tugas kebijakan ekonomi. Fungsi satuan tugas ini yaitu melakukan deregulasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha secara bertahap.

Pertama, Pokja Kampanye. Kedua, Pokja Penuntasan Peraturan. Ketiga, Pokja Evaluasi (regulatory impact). Keempat, Pokja Penanganan dan Penyelesaian Kasus. Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, masuk pada kategori Pokja Evaluasi. Pokja ini semacam gerakan ekonomi nasional karena mengakumulasi semua energi kementerian maupun pengusaha. Setiap minggunya, kinerja pokja-pokja ini harus dilaporkan ke Presiden.

Teks Pradany Hayyu

Menkeu Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PT PII dan Kopelindo

Foto Indratmo

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyaksikan penandatanganan perjanjian pembiayaan bersama (co-financing) antara PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopel Infrastruktur). Penandatanganan ini dilakukan oleh Presiden Direktur PT PII Arisudono Soerono dengan Direktur Utama Kopel Infrastruktur Herianto Pribadi di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Jumat (3/6).

Kerja sama ini dilakukan untuk memenuhi pembiayaan terkait proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan modal sebesar USD250 juta atau setara dengan Rp3,2 triliun, diharapkan dalam lima tahun ke depan investasi infrastruktur dapat mencapai USD1 miliar

atau Rp13 triliun.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kerja sama ini memberi *return* yang baik untuk infrastruktur. "Kita ingin pembiayaan non-APBN yang orientasi jangka panjang. Sumber dana tersebut salah satunya Kopelindo dan dana pensiun. *Match* dengan proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang. *Match* sumber dana dengan karakteristik proyek," jelas Menkeu. Keterlibatan Kopelindo di bidang infrastruktur membuktikan bahwa Kopelindo turut mendukung prioritas pembangunan nasional.

PT PII dan Kopelindo Infrastruktur menyepakati kerja sama pembiayaan bersama dan jasa *advisory* atau konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, baik yang dibangun

pemerintah, KPBU, BUMN/BUMD, maupun swasta. Adapun sektor yang akan dibiayai secara bersama-sama difokuskan pada sarana dan prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

Pada kesempatan tersebut, Direktur PT PII, Arisudono Soerono menyebutkan bahwa pihaknya tidak menganggarkan budget khusus. "Karena memang kami perusahaan pembiayaan. Berapa yang dibutuhkan klien akan kami siapkan. Makin besar, makin baik," katanya.

Sebagai informasi, PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan sedangkan PT Kopelindo merupakan anak perusahaan Koperasi Pegawai dan Pensiunan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Teks Amelia Safitri



Kemenkeu Sosialisasikan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Foto
Dok. BKF



Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Sosialisasi digelar di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada 16-17 Juni 2016.

Dalam sosialisasi tersebut, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, UU PPKSK pada intinya menitikberatkan pada upaya pencegahan krisis. “Terutama melalui pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank sistemik,” ungkap Menkeu dalam sambutan pada Kamis (16/06).

Ia menambahkan, jika terjadi

permasalahan bank sistemik, hal tersebut harus diselesaikan dengan konsep *bail-in*, yaitu penanganan permasalahan dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan kontribusi perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah mengimbau pemilik dan pengelola bank agar memiliki komitmen yang lebih kuat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, UU ini juga memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pemangku jabatan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan tersebut berarti bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); sekretaris KSSK; anggota sekretariat KSSK; serta pejabat atau pegawai Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara

perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan undang-undang tersebut.

“DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah di dalam undang-undang ini sepakat bahwa yang dimandatkan oleh Undang-Undang PPKSK itu adalah perlindungan selama si pengambil keputusan mengambil keputusan sesuai dengan mandatnya,” jelas Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara saat memberikan sambutan pada pembukaan hari kedua sosialisasi, Jumat (17/06).

Namun demikian, apabila pihak yang melaksanakan tugas berdasarkan UU tersebut menghadapi tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK, maka pihak tersebut akan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau yang menugaskan.

Teks Novita Asri H.



Foto
Bagus Wijaya

Investasi Syariah: Menenangkan dan Menguntungkan

Industri keuangan syariah, termasuk investasi semakin memikat masyarakat beberapa tahun terakhir. Investasi ini dapat memberikan alternatif strategis untuk menjaga kesiapan finansial di masa depan. Seperti apa laju pertumbuhan pasar modal yang menjalankan prinsip-prinsip islami ini? Hosea Nicky Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menuturkan kepada Media Keuangan, bagaimana investasi syariah bisa menjadi primadona.

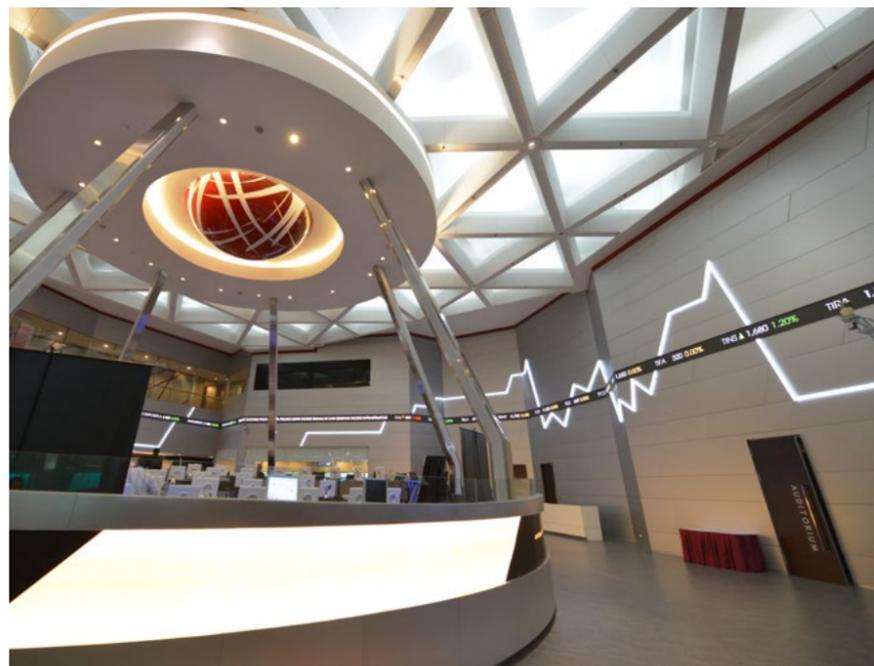
Bagaimana perkembangan pasar modal syariah Indonesia?

Saat ini kita punya 525 perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek. Sekitar 318 atau 60 persen diantaranya menjalankan prinsip syariah. Awal 2011, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa syariah untuk perdagangan di bursa efek. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga setiap 6 bulan mengeluarkan daftar saham-saham syariah. Kini perusahaan efek juga sudah memiliki sistem transaksi syariah melalui *online trading*. Jadi, investor hanya bisa membeli saham yang syariah karena di luar itu transaksi otomatis akan ditolak.

Selain itu, prinsip syariah tidak mengenal utang. Jika investor tidak punya uang, ya tidak bisa beli saham walaupun dia punya jaminan saham lain. Hal ini berbeda dengan transaksi konvensional dimana jika investor punya jaminan Rp10 juta, dia masih bisa beli saham. Sampai akhir tahun lalu kita punya sekitar 430 ribu investor, hanya sekitar 4.900 yang tercatat sebagai investor syariah. Memang masih sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah lebih berkembang.

Seperti apa potensi pengembangannya?

Mestinya sangat besar, apalagi penduduk kita mayoritas muslim. Selain itu, 40 persen dari penduduk kita sebenarnya usia produktif. Perkembangan



teknologi juga sudah mendukung. Dulu, kalau orang ingin buka rekening efek, setoran awalnya harus Rp10 sampai Rp25 juta. Sekarang cukup dengan Rp100 ribu masyarakat sudah bisa buka rekening untuk membeli saham maupun reksa dana. Jadi sebenarnya potensinya sudah ada dan kesempatannya pun terbuka. Semua memang butuh proses, baik untuk aturan main investasi, meningkatkan literasi, maupun pengembangan produk. Namun sejauh ini dunia investasi syariah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan.

Apakah investasi di pasar modal hanya untuk mereka yang berkantong dalam?

Persepsi yang selama ini berkembang adalah investasi itu sulit dan butuh kantong tebal. Kalau kita kembali bicara bahwa dengan Rp100 ribu bisa langsung jadi investor, siapa sih yang bisa menyisihkan uang Rp100 ribu setiap bulan? Menurut saya mungkin lebih dari 50 persen penduduk kita bisa menyisihkan Rp100 ribu untuk beli

saham atau reksa dana, termasuk yang syariah. Nah, hal ini yang perlu terus kita sosialisasikan.

Artinya, mahasiswa pun sudah bisa berinvestasi bukan?

Betul, bahkan mahasiswa juga. Kami juga melakukan sosialisasi untuk mereka. Tahun lalu kami bekerjasama dengan salah satu manajer investasi yakni Manulife Asset Management dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami membuka tidak kurang dari empat ribu rekening reksadana untuk mahasiswa barunya dengan setoran awal Rp100 ribu. Harapannya, mereka akan melakukan pembelian secara rutin untuk investasi jangka panjang.

Seperti apa umumnya perilaku investor pemula?

Biasanya, mereka akan lebih sering memantau pergerakan harga. Disinilah kami perlu memberi pemahaman bahwa sebenarnya investasi adalah setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Mestinya,

seorang investor tidak boleh terlalu terganggu dengan pergerakan harga karena kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Kalau memang *invest* untuk 5-10 tahun lagi kenapa setiap hari harus selalu dicek? Malah bikin stress. Catatan di bursa kita menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 5-10 tahun saham-saham itu dapat memberikan imbal hasil lebih dari 15 persen per tahun, lebih tinggi dari tabungan dan deposito.

Hal apa yang paling penting untuk dipahami masyarakat?

Perubahan pola pikir bahwa menabung sama dengan investasi. Menabung itu hanya menyimpan uang dan jelas akan tergerus oleh inflasi. Di masa kini dan akan datang, investasi sudah menjadi kebutuhan bukan pilihan. Kita perlu sedini mungkin menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan.

Bagaimana dengan persepsi bahwa investasi pasar modal menyerupai judi?

Judi itu kalau kita memperlakukan saham menjadi alat spekulasi. Tapi kalau saya beli saham memang untuk jangka panjang, itu jelas jauh dari konteks spekulasi. Begitu pula dengan metodologi dan akad perdagangannya. Saya rasa orang yang bertransaksi saham secara jangka pendek, tentunya lebih spekulatif. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, sekali lagi data bursa menunjukkan imbal hasil seperti itu.

Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dipasarkan ini benar-benar mengikuti prinsip-prinsip islami?

MUI dan OJK selaku pengawas sudah mengeluarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kemudian diluar itu,

bursa sendiri memiliki Jakarta Islamic Index yang berisi 30 saham yang paling besar dan *liquid*. Jadi biasanya kalau ada masyarakat yang mau mulai berinvestasi di saham, kita arahkan ke-30 saham tersebut. Hampir semuanya perusahaan besar yang sudah *go public* dan produk-produknya sudah familiar. Panduan itu yang kita berikan kepada masyarakat.

Apa saja yang dilakukan untuk memperkenalkan investasi syariah kepada masyarakat?

Awal tahun kemarin kami membuat festival pasar modal syariah. Antusiasmenya tinggi, ada yang membuka rekening saham maupun reksadana syariah. Kami juga menyelenggarakan sekolah pasar modal syariah setiap minggu. Kemudian, tahun ini kami menambah lebih banyak galeri investasi syariah bekerjasama dengan perusahaan sekuritas dan perguruan tinggi. Saat ini kami punya 180 galeri investasi dan 5 diantaranya adalah khusus syariah. Untuk meningkatkan literasi masyarakat, kami banyak bekerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Forum Studi Ekonomi Islam (FOSEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan beberapa lembaga lain untuk program-kegiatan di berbagai kota di Indonesia.

Siapakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola pasar modal syariah?

Saat ini sebenarnya kita masih kekurangan SDM. Di pasar modal, para pemasar harus punya izin. Saat ini ada delapan ribu lebih jumlah pemegang izin broker, tetapi yang aktif di perusahaan efek kurang dari tiga ribu. Nah, tiga ribu pemegang izin ini harus menangani 480 ribu investor, *kan* sebenarnya rasionya terlalu sedikit. BEI memiliki

lembaga bernama The Indonesia Capital Market Institute (TICMI). Mereka menyelenggarakan pendidikan dan ujian untuk masyarakat bisa memperoleh izin sebagai broker. Ujian itu dilakukan bukan hanya di Jakarta namun juga di kota-kota dan sudah bisa dilakukan secara *online*.

Di samping itu, OJK dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan mengenai penerangan izin broker. Kalau dulu atau sekarang ini seorang penjual dan seorang direktur izinnnya sama, yaitu izin broker. Pada peraturan baru nanti, sertifikasi untuk setiap tingkat mulai dari pemasar hingga manajemen akan berbeda. Dari situ kita dapat menyiapkan SDM yang handal dan kompeten di bidang pasar modal.

Kebijakan apa yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi syariah?

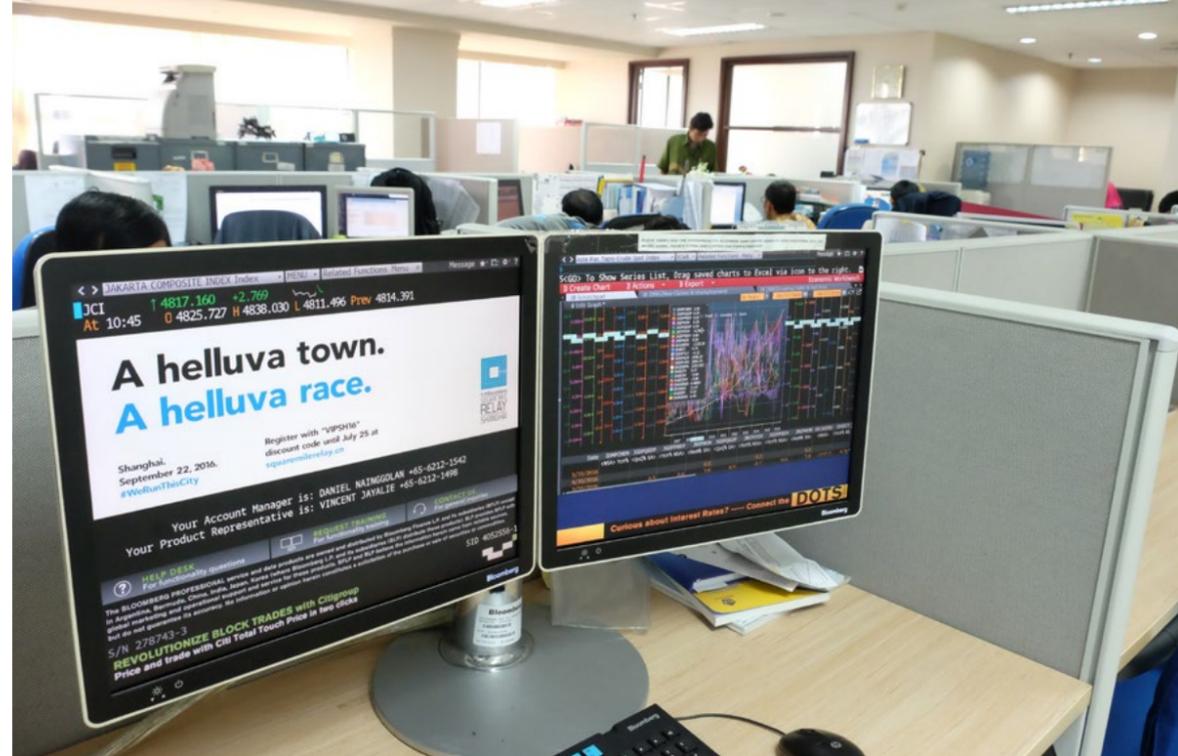
Dari sisi investor salah satu *concern* utamanya adalah proses pembukaan rekening saham yang cenderung lebih lama dibandingkan dengan membuka rekening di perbankan. Di pasar modal, investor harus membuka sub rekening terlebih dahulu baru kemudian membuka rekening dana nasabah juga. Jadi dengan sendirinya membukan waktu lebih panjang, bisa memakan waktu beberapa hari. Kadang-kadang, hal itu juga yang membuat masyarakat menjadi malas. Sebab itu, kita juga butuh dukungan dari perbankan agar proses administrasinya bisa lebih cepat.

Ke depannya kami kita juga akan butuh dukungan program untuk menambah jumlah emiten dari perusahaan yang sudah *go public*. Kami berharap pemerintah bisa menyertakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial untuk *go public*.

Teks Irma Kesuma

Analisis Akurat Demi APBN Sehat

Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal



Memantau pergerakan harga minyak internasional pada aplikasi Bloomberg.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Rofyanto Kurnianto.

Foto Bagus Wijaya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk menjadikan negara ini stabil dan kuat, membutuhkan sebuah perencanaan anggaran dan pembiayaan yang disusun setiap tahunnya. Unit yang khusus merumuskan APBN di lingkungan Kementerian Keuangan dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Kali ini Media Keuangan akan mengulas seluk beluk Pusat Kebijakan APBN yang berada di bawah Badan Kebijakan Fiskal. Pusat Kebijakan APBN pada tahun 2006 bernama Pusat Kebijakan Belanja Negara yang berada di bawah Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (Bapekki). Pusat Kebijakan Belanja Negara saat itu bertugas melakukan analisis dan rekomendasi di bidang belanja negara.

Dalam perkembangannya, tugas dan peran Pusat Kebijakan Belanja Negara semakin dominan dalam merumuskan Nota Keuangan. Maka, pada tahun 2010 Pusat Kebijakan Belanja Negara

bertransformasi menjadi Pusat Kebijakan APBN. Pusat Kebijakan APBN memiliki tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Pusat Kebijakan APBN Rofyanto Kurnianto menjelaskan tugas dan fungsi unit yang dipimpinnya. Rofyanto mengungkapkan, keunggulan Pusat Kebijakan APBN terletak pada analisis mengenai APBN dan rekomendasi kebijakan fiskal. Saat ini, Pusat Kebijakan APBN merekomendasikan reformasi kebijakan fiskal untuk mencapai sasaran dan target pembangunan. Salah satu implementasinya adalah meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*) sehingga belanja negara benar-benar memenuhi aspek efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi.

Reformasi subsidi

Salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh Pusat Kebijakan APBN yaitu reformasi subsidi dalam rangka efisiensi belanja subsidi. Pada tahun 2015, Pemerintah telah melakukan reformasi subsidi BBM dengan menghapus subsidi BBM jenis premium. Selain itu,

Pemerintah juga mengubah skema subsidi BBM jenis solar dari subsidi selisih harga menjadi subsidi tetap. Implementasi kebijakan ini berdampak signifikan bagi penurunan anggaran subsidi BBM, yaitu sebesar Rp211,3 triliun menjadi Rp64,7 triliun dalam APBN-P tahun 2015.

Kebijakan reformasi subsidi tersebut membawa nilai positif bagi pemerintah. Pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja yang lebih produktif, misalnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan transfer ke daerah. "Di sisi lain, kami menyadari, dalam jangka pendek penyesuaian harga yang terjadi setelah realokasi subsidi akan mempengaruhi inflasi. Namun kebijakan ini akan mendukung pengendalian inflasi ke depan seiring pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," jelas Rofyanto.

Peran utama menyusun APBN

Pusat Kebijakan APBN tentu berperan strategis dalam proses penyusunan APBN 2016. Pedoman yang digunakan dalam menyusun APBN 2016 yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2016. Tema PPKF tahun 2016 adalah "Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas".

Secara teknis, Pusat Kebijakan APBN berperan penting dalam perumusan kebijakan pendapatan dan belanja negara. Dari segi pendapatan, Pusat Kebijakan APBN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menghitung proyeksi target penerimaan perpajakan (tidak termasuk PPh migas). DJP dan DJBC memberikan masukan proyeksi target yang akan dihitung oleh BKF melalui Pusat Kebijakan APBN.

Nantinya, usulan tersebut akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk dimasukkan ke dalam postur Rancangan APBN (RAPBN)/Rancangan APBNP (RAPBNP). Postur

RAPBN/RAPBNP akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dalam forum Rapat Pimpinan Kemenkeu.

Sumber daya manusia

Pada awal dibentuknya Pusat Kebijakan APBN pada tahun 2006, jumlah pegawai unit Eselon II ini hanya berkisar 30 orang. Saat ini jumlah pegawai Pusat Kebijakan APBN mencapai 76 pegawai yang terbagi menjadi lima unit Eselon III, yaitu Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, Bidang Kebijakan Subsidi, dan Bidang Kebijakan Keuangan Daerah. Rofyanto mengungkapkan, komposisi pegawainya saat ini terbilang cukup. Ia berharap, para pegawai memiliki semangat untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan analisis.

Dari sisi institusi, Pusat Kebijakan

APBN juga memberikan berbagai pelatihan atau *workshop* kepada para pegawai. Di samping itu, Pusat Kebijakan APBN juga telah mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga donor dalam bentuk *technical assistant*. *Technical assistant* berupa penempatan beberapa *foreign expert* di Pusat Kebijakan APBN sebagai partner diskusi untuk memperbaiki teknik analisis atau metodologi *forecasting*-nya.

Produktivitas Pusat Kebijakan APBN terbilang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa publikasi hasil penelitian, baik yang dirilis di jurnal dalam negeri maupun internasional. Jurnal internasional meliputi *Economic Modelling*, *International Journal of Public Economic Policy Studies*, *Journal of Travel Research*, dan *Tourism Economics*. Selain itu, Pusat Kebijakan APBN juga berperan aktif sebagai *presenter* atas penelitian yang dipublikasikan pada forum-forum konferensi internasional.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Wardah Adina

Kerja Keras Kerja Tuntas

"Hal yang selalu saya tanamkan ke diri saya, jangan berpikir apa yang dikerjakan. Jangan berpikir orang mau memberikan justifikasi tentang apa yang kita kerjakan, tapi satu, kerjakan."

Terdengar suara melenguh seekor sapi saat seorang anak laki-laki sedang memerah susu di pekarangan rumahnya. Bila bagi sebagian anak, memerah susu terasa menakutkan dan menjijikan maka lain halnya dengan Suryo Utomo. Bukan hal asing bagi pria kelahiran Semarang, 26 Maret 1969 ini untuk memelihara sapi, memerah susu, mengurus kandang bahkan sampai membantu sapi melahirkan.

Kedekatan masa kecil anak pasangan Sumardi dan Suparmi ini dengan *mengangon* (memelihara) sapi membentuk pribadi yang tak gampang menyerah pada keadaan. “Saya gede (tumbuh besar) dari sapi. Memang hidupnya dari situ (pelihara sapi). Bapak saya dulu kontraktor, Ibu saya pedagang bahan bangunan. Ibu saya bantuin Bapak saya, (sementara) di rumah *ngopeni* sapi, jadi betul-betul tradisional,” ujar Suryo.

Meskipun bukan tentara, lanjut Suryo, kedua orangtuanya mendidiknya dengan begitu keras. “Untuk mencapai sesuatu harus *survive*.” Mereka mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup yakni dengan bekerja keras, salah satunya dengan memelihara sekitar 15-20 ekor sapi di rumah. Tak selesai sampai disitu, Suryo kerap kali harus mengirimkan susu hasil produksi sapinya pada tiga pabrik di daerahnya.

Apabila stok susu tidak mencukupi padahal pesanan meningkat, maka sebelum jam 4 pagi, Suryo langsung membawa motornya keluar rumah dan mencari susu. “Orang-orang masih pada tidur, sebelum subuh saya sudah bawa

motor dengan dua tangki (susu). Kalau ada pos-pos susu saya samperin, kita kumpulin. Sebelum jam 9 pagi (susu) dimasak lalu dikirim,” ceritanya.

Menemukan jalan

Pasca menamatkan sekolah menengah atas negeri 4 Semarang, Suryo pun mendaftar di Universitas Diponegoro dengan pilihan jurusan Kimia dan Akuntansi. Saat pengumuman kelulusan ternyata takdir berkehendak lain, pria yang sebenarnya ingin menjadi sarjana Kimia itu justru diterima di jurusan akuntansi.

Suryo mengakui, awal masa kuliah pada jurusan akuntansi membuatnya agak kecewa. Akibat rasa penasaran, tepat satu tahun kemudian, anak terakhir dari tiga bersaudara ini kembali mengikuti ujian masuk universitas negeri dengan pilihan jurusan Kimia dan akhirnya diterima. Namun demikian, impian hanyalah angan. Keterbatasan biaya membuat Suryo kembali mengurungkan impiannya menjadi sarjana Kimia.

“Tahun pertama (akuntansi) itu seperti niat tidak kuliah. Sampai tengah tahun kedua saya ingin pindah tapi bapak saya bilang tidak usah, (karena) mesti bayar lagi. Yaudah kita putuskan terusin (kuliah akuntansi). Saya kuliah enam tahun, Alhamdulillah lulus dan di situ saya menemukan jalan. Saya cuma mengikuti *flow* perkembangan hidup saya,” tuturnya.

Setelah lulus pada bulan Agustus 1992, Suryo bekerja sebagai dosen di almamaternya. Tak lama berselang,

Suryo melamar untuk bekerja di Garuda, BPIS/BPPT dan Kementerian Keuangan. Mujur, Suryo diterima pada ketiga tempat tersebut dan memilih untuk mengabdikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Alih-alih langsung bekerja, Suryo malah diwajibkan mendalami pengetahuan pajak di Pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) pajak, Slipi Jakarta Barat selama sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, Suryo baru bekerja di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu hingga tahun 1995.

Baru sekejap merasakan ritme kerja, Suryo mengikuti test untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Alhamdulillah diterima.” Suryo lalu kembali mengikuti diklat selama sekitar 9 bulan di Jurang Mangu sebagai persiapan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Suryo dipercaya melanjutkan S2 di Southern California University hingga meraih gelar Master of Business Taxation pada tahun 1998.

Sekembalinya dari Amerika, Suryo sempat dipekerjakan pada dua tempat. Pertama, Suryo dipekerjakan pada Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Subdirektorat PPN Industri, Direktorat PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Kedua, Suryo juga pernah dipekerjakan di Seksi Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus.

Lalu di tahun 2006, Suryo diangkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga yang masih berada di wilayah kerja Kanwil

DJP Jakarta Khusus. Dua tahun kemudian, Suryo ditempatkan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu di wilayah kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Menurut Suryo, sebagai kepala kantor untuk dapat menangani suatu permasalahan maka ia harus mengerti kantornya sendiri. Ibarat memiliki sebuah rumah, lanjut Suryo, kepala rumah tangga harus mengerti rumahnya sendiri. Kedua, kepala rumah tangga juga harus memahami secara detail kondisi anak-anaknya pada saat itu.

“Sama seperti di kantor, kalau kita tau persis kantor seperti apa, tidak ada masalah. *Key point*-nya, asal kita memahami kantor kita seperti apa, *everything we do fine*,” kata pria yang sempat menjadi Eselon III termuda kala itu.

Dalam menghadapi para wajib pajak besar, Suryo mengatakan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ini karena setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki landasan aturan, dilindungi oleh Undang-Undang dan dilindungi Tuhan. “Risiko pasti muncul, tapi kalau kita bekerja dengan konteks yang benar, tidak usah takut.”

Pada tahun 2009, Suryo dipercaya menjadi Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I di Semarang. Satu tahun kemudian, ia kembali ke Jakarta lalu dipercaya sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I. Kemudian pada Maret 2015, Suryo menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian lalu pada Juli 2015 diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak.

Dimutasi ke sejumlah tempat, lagi-lagi tak membuat pria yang senang berolahraga dan naik gunung ini memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Suryo mengungkapkan bahwa dirinya hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk beradaptasi di tempat baru dimana ia berada.

Suryo menganalogikan tantangan di tempat ia bekerja seperti seseorang yang naik gunung, dia akan bertemu jalan yang terjal maupun jalan yang penuh pepohonan di hutan. Intinya, apapun tantangan yang ada dalam pekerjaan maka harus diselesaikan.

Akhirnya, saat Suryo diamanahkan menjadi Staf Ahli, “rasanya ini *achievement* terbaik saya, *part* (bagian) dari anugerah. Tuhan kasih kesempatan, saya curahkan kemampuan untuk mengisi kesempatan itu. Saya tak pernah berpikir saya mengerjakan benar dan baik. Makanya disetiap titik tadi saya

mencoba untuk *fully dedicate* waktu yang saya punya untuk bekerja,” ujarnya.

Menghargai

Suami dari Sri Widiyastuti ini sadar bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi dulu ketika ia masih muda. Karena itulah, ayah dari Arinda Arum Hapsari dan Adhitama Aria Buana ini selalu mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai hasil kerja keras.

“Saya terapkan ke anak itu bagaimana mereka menghargai hasil kerja. Jadi yang dilihat bukan berapa yang kita punya tapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan itu. Itu yang saya tanamkan. Jadi jangan lihat sekarang Bapakmu banyak duit nih misalkan, lihat lah pada waktu bagaimana (upaya) mendapatkannya,” jelasnya.

Tanpa segan, Suryo seringkali memindahkan anaknya ke sekolah yang berbeda dengan tujuan untuk melatih kemampuan menyesuaikan diri. Meskipun mulanya mereka menolak keras keputusan tersebut tetapi sekarang mereka merasakan bahwa usaha tersebut ternyata memudahkan langkah mereka. Bagi Suryo, kehidupan seseorang tidak selamanya berjalan linier atau datar, suatu saat ada jalan berkelok atau naik maupun turun sehingga membutuhkan proses adaptasi yang cepat.

Terakhir, Suryo hanya ingin menjadi seorang yang lebih baik. “Keinginan normatif tapi susah. Saya bukan orang baik tapi satu hal saya selalu berusaha untuk tidak berbuat yang tidak baik. Kalau sebagai bagian institusi pemerintahan, saya ingin bagaimana tugas dan fungsi ini dapat dijalankan dengan benar,” paparnya.

Teks lin Kurniati

Selangkah Lagi Dua Regulasi Disepakati

Juni menjadi bulan yang sibuk bagi pemerintah dan DPR. Setidaknya tiga agenda penting di bidang ekonomi sedang berlangsung di Gedung Parlemen. Ketiganya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Tax Amnesty*, Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016, dan Rancangan APBN 2017. Pembahasan RAPBNP 2016 diharapkan rampung sebelum 30 Juni, sedangkan RUU *Tax Amnesty* diharapkan bisa disepakati sebelumnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, pembahasan intensif soal *draft* akhir RUU *Tax Amnesty* terus dilakukan dengan Panitia Kerja DPR. “Ada beberapa isu yang masih perlu disepakati, tapi kami optimis bisa diselesaikan bulan ini,” kata Luky kepada Media Keuangan di kantornya, Jakarta, Rabu (15/6). Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai persiapan jika rancangan final UU Pengampunan Pajak disepakati bersama anggota dewan.

Persiapan tersebut antara lain meliputi administrasi dan strategi komunikasi. Yang termasuk dalam urusan administrasi adalah sistem teknologi informasi, kesiapan petugas di lapangan, ketersediaan formulir, hingga pelatihan terhadap para pegawai yang menjadi *frontliner* di kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara strategi komunikasi dilakukan dengan menggandeng *stakeholders* seperti pengamat, pelaku usaha, akademisi, dan media. “Kami ingin

mempunyai strategi komunikasi yang komprehensif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat,” ujar Luky.

Dalam kesempatan itu, Luky juga mengungkapkan pemberlakuan UU *Tax Amnesty* memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, pengampunan pajak diharapkan dapat turut menggerakkan perekonomian. Caranya dengan mengembalikan uang milik orang-orang Indonesia melalui skema repatriasi. “Kalau dibawa kembali uang dan aset itu ke Indonesia, kami berikan potongan pajak yang disebut uang tebusan,” kata dia. Di samping itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai momentum tepat untuk membangun *data base* perpajakan yang lebih baik dan valid. Dalam sistem pelaporan pajak *self assessment*, akses terhadap data basis pajak menjadi kunci. *Ketiga*, pemberlakuan *tax amnesty* bisa menambah penerimaan negara. “Tahun ini kami berharap mendapatkan *windfall* yang sudah dimasukkan juga dalam postur RAPBNP. Mudah-mudahan ada tambahan penerimaan negara, kurang lebih sebesar Rp165 triliun, dari program *tax amnesty*,” ujar Luky menambahkan.

Dalam wawancara terpisah dengan Media Keuangan di hari yang sama, Ekonom Kenta Institute Eric Sugandhi berpendapat bahwa DJP nantinya perlu mengejar komitmen dari wajib pajak yang berencana memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*. “Saya pikir perlu juga ada *punishment* bagi mereka yang tidak jadi memenuhi komitmen (untuk membayar uang tebusan). Dalam kasus terburuk misalnya diungkap identitasnya ke

publik,” kata Eric. Senada dengan Luky, komunikasi kepada publik menjadi syarat penting keberhasilan implementasi kebijakan ini. “Agar tidak terjadi resistensi yang kuat dari masyarakat,” ujarnya lagi.

DJP diharapkan bersiap untuk membuat acara sosialisasi, baik dalam bentuk seminar dan *talkshow* maupun publikasi iklan dan infografik di media massa serta elektronik. Dengan demikian, informasi tentang UU *Tax Amnesty* sampai kepada wajib pajak dengan benar. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Ario Pratomo, Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Sabtu (18/6). “Hal yang paling penting untuk disosialisasikan adalah mekanisme atau tata cara pelaporan untuk mendapatkan fasilitas *tax amnesty*,” tutur Wahyu.

Di samping itu, Wahyu juga menggarisbawahi perlunya memberikan informasi dampak positif repatriasi dana pengusaha Indonesia dari luar negeri terhadap peningkatan daya saing ekonomi melalui penurunan suku bunga dan nilai tukar rupiah. Yang sama pentingnya, pemerintah juga harus menyiapkan produk-produk keuangan yang dapat menyerap aliran dana masuk dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan. “Otoritas Jasa Keuangan harus menyediakan infrastruktur pendukung dalam berbagai bentuk pengaturan dan pengawasan,” kata dia.

Realisasi APBN dan pembahasan APBNP

Urgensi pengesahan RUU *Tax Amnesty* menjadi semakin jelas jika



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat pembahasan APBNP 2016 bersama Komisi XI di Gedung DPR, Senin (6/6).

Foto
Anas Nur Huda

menyimak realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei. Menurut Luky, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp496,6 triliun atau 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun. Total pendapatan itu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp406,9 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp89,1 triliun.

Sementara itu, realisasi total belanja negara yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei mencapai Rp685,8 triliun atau 32,7 persen. Realisasi belanja terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp357,4 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp328,4 triliun. Jika dibandingkan dengan data pada Mei 2015 sebesar Rp604,9 triliun, realisasi belanja APBN 2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Kenaikan ini antara lain bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah.

Hingga bulan kelima, realisasi defisit APBN mencapai sebesar Rp189,1 triliun atau 1,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk membiayai defisit, pemerintah telah melakukan pengadaan pembiayaan yang berasal dari utang. Pembiayaan ini dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara dan penarikan pinjaman sebesar Rp211,2 triliun serta pembiayaan non-utang yang bersumber dari perbankan dalam negeri sebesar Rp2,1 triliun.

Luky mengungkapkan investor dan

pelaku pasar masih menunggu kepastian implementasi program pengampunan pajak. Dia memastikan bahwa program penegakan hukum sebagai salah satu upaya mencapai penerimaan pajak tetap dijalankan. “Namun, bagaimanapun juga tidak terlalu efektif karena orang masih menunggu implementasi *tax amnesty*,” kata Luky.

Realisasi pendapatan sebesar 27,2 persen dinilai tidak terlalu buruk dan lebih baik dibandingkan tahun lalu. “Ini merupakan indikator penerimaan pajak kita sudah lebih membaik. Kami optimis,” ujar Luky. Dalam proses pembahasan APBNP dengan Komisi XI dan Badan Anggaran DPR, asumsi pertumbuhan koreksi disepakati di angka 5,1 persen, lebih besar dari realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar 4,9 persen. Menurut Luky, asumsi ini juga menunjukkan semangat optimisme pemerintah dan parlemen.

Kencangkan ikat pinggang

Pembahasan APBNP 2016 juga mengangkat isu efisiensi anggaran. Beberapa waktu lalu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016. Pada intinya, setiap K/L diminta untuk melakukan penghematan dan pemotongan belanja pada APBNP.

Kebijakan “pengencangan ikat pinggang” menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi belanja pemerintah dalam mengantisipasi melesetnya penerimaan negara. Di samping itu, kebijakan ini juga diambil untuk memitigasi pelebaran defisit.

Meskipun ada efisiensi anggaran, Luky menjamin bahwa prioritas utama belanja yang harus dihemat adalah belanja operasional dan belanja non-operasional yang tidak prioritas. Jenis belanja tersebut meliputi ongkos perjalanan dinas, konsinyering, rapat kerja, seminar, belanja iklan, dan belanja jasa lainnya yang tidak prioritas. Kemenkeu sendiri diminta menghemat Rp1,47 triliun anggarannya. Meski melakukan penghematan, kinerja kementerian diharapkan tidak akan terganggu. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran yang diajukan pemerintah dalam APBNP sekitar Rp50 triliun.

Dalam sudut pandang pengamat, di samping belanja non-produktif K/L, menurut Wahyu, pengurangan subsidi yang tidak produktif dan tidak tepat sasaran juga perlu diambil untuk mempertahankan belanja K/L yang produktif. Kebijakan lainnya yang dapat ditempuh adalah mendorong kerja sama dengan swasta. “K/L dapat menyusun kebijakan yang memberikan dorongan bagi swasta untuk tertarik di dalam program-program yang telah disusun,” kata dia.

Dari Yogyakarta, Abdul Halim, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengingatkan perlunya langkah tegas saat RUU *Tax Amnesty* dan RUU APBNP disahkan dalam waktu dekat. “Dari pengalaman di negara kita, penegakan hukum, dalam hal ini terkait pengampunan pajak, masih relatif lemah. Di samping itu, penghematan anggaran menjadi kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang anggaran dinamis,” kata Abdul. Dia berharap pemerintah juga memberikan perhatian khusus untuk mendalami anggaran yang tumpang tindih antara pusat dan daerah.



Luky Alfirman
Juru Bicara Kementerian Keuangan

"Kami memasukkan angka proyeksi dari tambahan penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp165 triliun. Jujur saja, angka ini sebenarnya sangat realistis dan konservatif. Dengan catatan *tax amnesty* bisa berlaku, kami optimis pasti bisa mencapai angka tersebut.

Mungkin selama ini masih terjadi salah persepsi, seolah-olah pengampunan pajak untuk orang kaya. Ini untuk Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi. Selama surat pemberitahuan (SPT)-nya tidak benar, khususnya dalam pelaporan aset, itu bisa memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*.

Saat ini sudah ada tim untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi apa saja yang bisa dipakai sebagai sarana dana repatriasi masuk ke dalam negeri, termasuk skemanya. Tim ini melibatkan kalangan lintas sektoral. Pada intinya, konsep yang kami pakai saat ini adalah nanti akan ada semacam *gate away*. Dana repatriasi akan masuk ke dalam *gateway* tadi, bisa dalam bentuk manajer investasi, perusahaan sekuritas, atau lewat bank yang ditunjuk. Dari sana akan disalurkan ke berbagai instrumen yang tersedia, misalnya membeli SUN, obligasi korporasi, reksadana, dan lain-lain."



Wahyu Ario Pratomo
Ketua Departemen Ekonomi
Pembangunan FEB USU

"Apabila terjadi *shortfall* dari penerimaan pajak, maka kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah adalah melakukan efisiensi terhadap belanjanya. Pemotongan anggaran belanja khususnya belanja yang tidak produktif di kementerian dan lembaga dapat dilakukan. Di samping itu pemerintah juga dapat melanjutkan kebijakan konversi Dana Alokasi Umum dengan Surat Berharga Negara bagi pemerintah daerah yang tidak baik pengelolaan keuangan daerahnya.

Lebih jauh, pemerintah dapat mengajukan kepada DPR untuk menambah utang agar belanja produktif pemerintah tidak berkurang. Selanjutnya, pemerintah dapat juga meningkatkan kerja sama dengan swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan intervensi terhadap hambatan-hambatan investasi di daerah agar proses pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar. Hal tersebut akan meningkatkan keyakinan bagi pelaku bisnis."



Eric Sugandi
Ekonom Kenta Institute

"Pemotongan belanja pasti akan berpengaruh terhadap kinerja K/L. Yang penting adalah bagaimana meminimalisir dampaknya. Pembangunan infrastruktur penting, tapi jangan lupa alokasikan dana untuk melindungi kelompok miskin. BLT (bantuan langsung tunai) tahun ini sudah tidak mungkin, apalagi karena ada *shortfall* di penerimaan. Apa yang bisa dilakukan adalah jangan terlalu banyak melakukan pemotongan di pos-pos yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial masyarakat miskin.

Masukan saya kepada Presiden Jokowi adalah agar pada tahun-tahun mendatang lebih realistis dalam menetapkan asumsi-asumsi anggaran (terutama pertumbuhan ekonomi) dan lebih berimbang dalam alokasi belanja pemerintah. Prinsip *money follow functions* sebagai sebuah konsep terlihat bagus, tapi definisi fungsinya juga harus jelas dan realistis."

Teks Dwinanda Ardhi

INGIN TAHU
DIKLAT APA SAJA
YANG SUDAH
ANDA IKUTI?

SILAKAN KUNJUNGI:

Semantik

Sistem Manajemen Diklat dan Informasi BPPK

<https://www.semantik.bppk.kemenkeu.go.id>



Informasi lebih lanjut:
HALO BPPK 021-29054300



Peluang ALKI II Menjadi Jalur Global Trade

Teks Praptono Djuned, Badan Kebijakan Fiskal

Konsep negara kepulauan merupakan salah satu poin yang menjadi keputusan dalam Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di Chicago tahun 1982. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengajukan usulan tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan faktor hidro oseanografi agar alur pelayaran tersebut aman untuk dilayari setiap kapal.

Tahun 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO (*International Maritime Organization*) memutuskan untuk menerima usulan negara Indonesia terkait tiga ALKI tersebut. ALKI I yaitu suatu alur yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda. ALKI II yaitu alur yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok. Sementara itu, ALKI III yaitu alur yang melintasi Samudra Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. Kedua ALKI di kawasan timur Indonesia

merupakan potensi untuk pengembangan ekonomi kawasan dengan mengambil manfaat dari pesatnya perekonomian kawasan Asia Pasifik dan ASEAN.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sebagai negara kepulauan dan memenangkan persaingan internasional, Indonesia memerlukan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efisien dan efektif. Untuk mengembangkan Sislognas, pemerintah perlu memajukan transportasi laut yang akan menjadi tulang punggung Sislognas. Terkait hal itu, diperlukan regulasi dan berbagai kebijakan transportasi laut yang prinsipnya dapat memantapkan daya saing, efisiensi usaha ekonomi, optimalisasi ALKI, pemantapan hierarki, peran dan fungsi pelabuhan laut, menjalin konektivitas dengan pelabuhan negara lain (*port to port*), serta sinergis dengan penataan Ruang Wilayah Nasional dan Sistem Transportasi Laut Nasional. Dalam tulisan ini, penulis hanya membahas terkait dengan daya saing dan hierarki pelabuhan laut, kemudian ditutup dengan

beberapa tantangan yang dihadapi di sektor transportasi laut.

Daya saing dan hierarki pelabuhan laut

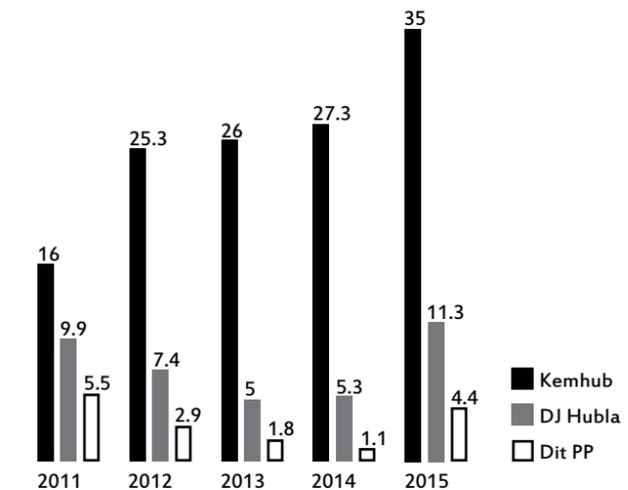
Negara Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.508 pulau dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km². Batas wilayah negara Indonesia terdiri atas wilayah paling utara adalah Pulau Weh (6° LU), wilayah paling selatan adalah Pulau Roti (11° LS), wilayah paling barat adalah Kota Sabang (95° BT), dan wilayah paling timur adalah Kota Merauke (141° BT). Dengan batas wilayah seperti itu, tampak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Lanskap seperti ini menempatkan Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan berpotensi menjadi tempat transit jalur perdagangan dunia dan menjadi pusat logistik dunia. Salah satu infrastruktur dasar yang mendukung sistem logistik nasional adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.

Menurut data *World Economic*

Forum, daya saing infrastruktur Indonesia secara umum (seperti pelabuhan laut, bandar udara, jalan, rel kereta api, dan energi listrik) berada di posisi ke-82 pada tahun 2013 dan posisi ke-72 pada tahun 2014. Posisi daya saing ini relatif lebih baik daripada daya saing infrastruktur pelabuhan laut Indonesia yang secara individual di posisi ke-89 (tahun 2013) dan 77 (tahun 2014). Jika daya saing Indonesia dikomparasi dengan daya saing beberapa negara ASEAN, posisi daya saing pelabuhan laut Indonesia pada tahun 2014 relatif lebih baik daripada Philippina (101) atau Vietnam (88), tetapi lebih buruk daripada Thailand (54) atau Malaysia (19).

Guna terus mendorong arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menetapkan beberapa wilayah menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBB) seperti Sabang, Batam, Bintan dan Karimun. Letak kawasan atau wilayah menjadi salah satu kriteria agar wilayah tersebut dapat

Grafik 1. Perkembangan Dana Pembangunan Pelabuhan Dalam DIPA Kemenhub
Sumber: Kemenhub dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2015, diolah.



diusulkan menjadi KPBB. Kebijakan KPBB terhadap empat wilayah tersebut diharapkan dapat mengambil manfaat ekonomi dari maraknya perdagangan internasional di sekitar ALKI I.

Menurut data Badan Pengusahaan Karimun (2014), jumlah kapal kontainer yang melintasi Selat Malaka pada tahun 2009 sekitar 71.360 kapal dengan tujuan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Uni Eropa. Pada tahun 2015 ini, diperkirakan kapal kontainer yang melintasi Selat Malaka sekitar 120 ribu kapal. Data ini mengindikasikan bahwa letak Karimun menjadi sangat strategis karena berbatasan dengan selat Malaka yang terkenal sebagai jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia.

Peningkatan investasi terjadi ketika Karimun menyandang status wilayah KPBB. Sebelum ditetapkan sebagai KPBB (periode 2006-2008), di Karimun hanya terdapat sembilan perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun. Sebagian besar investor bergerak di bidang usaha granit. Pada

2014, jumlah perusahaan yang masuk di Karimun mencapai 133 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp20,6 triliun. Walaupun demikian, status KPBB atas Karimun tampaknya belum dioptimalkan guna memperoleh manfaat ekonomi semaksimal mungkin dari maraknya perdagangan internasional melalui Selat Malaka di ALKI I. Contohnya, pembangunan pelabuhan baru Malarko di kabupaten Tanjung Balai Karimun, yang letaknya berdekatan dengan Selat Malaka, hingga sekarang belum selesai. Padahal, pembangunan fisiknya sudah dilaksanakan sejak sekitar lima tahun yang lalu.

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan pelabuhan laut termasuk dana pemeliharannya dalam DIPA Kementerian Perhubungan, sebagaimana Grafik 1 berikut ini. Alokasi dana untuk pembangunan pelabuhan laut yang dikelola oleh Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan itu

memiliki tren menurun pada periode 2011-2014. Apabila pada 2011 dana yang tersedia hampir mencapai Rp5,5 triliun, maka jumlah ini terus menurun hingga Rp1,1 triliun pada 2014. Namun, pada 2015, alokasi dana untuk pelabuhan meningkat kembali menjadi Rp4,4 triliun. Penurunan alokasi itu juga terjadi jika dilihat dari sisi proporsional. Pada 2011, dana yang dialokasikan untuk pelabuhan mencapai sekitar 30 persen dari total dana Kementerian Perhubungan, akan tetapi pada tahun 2015 hanya sekitar 12,6 persen.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019, pemerintah merencanakan untuk membangun, melanjutkan, atau menyelesaikan 100 pelabuhan laut non-komersial di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan laut Malarko. Pendanaan terhadap 100 pelabuhan tersebut secara total diperkirakan mencapai Rp47,5 triliun.

Selanjutnya, tentang hierarki pelabuhan laut. Pelabuhan laut dikategorikan dalam tiga jenis yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama memiliki fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam dan luar negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah besar, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan pengumpul hanya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan memiliki fungsi yang sama dengan dua fungsi terakhir pelabuhan utama. Sementara itu, pelabuhan pengumpan memiliki fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dengan jumlah terbatas, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan layanan dalam provinsi.

Pelabuhan laut di Indonesia berjumlah sekitar 1.240 pelabuhan (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-414 Tahun 2013). Jumlah tersebut meliputi 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, 249 pelabuhan pengumpan regional, dan 741 pelabuhan pengumpan lokal. Berdasarkan data Bappenas (2014), pada 2020 diharapkan jumlah pelabuhan bertambah menjadi 1.400 pelabuhan (terdiri atas 49 pelabuhan utama, 262 pelabuhan pengumpul, 225 pelabuhan pengumpan regional, dan 704 pelabuhan pengumpan lokal). Sementara itu, data dari *Indonesia Infrastructure Initiative* (2014) menyebutkan bahwa jumlah pelabuhan di Indonesia mencapai 2.392 pelabuhan, terdiri atas 111 pelabuhan komersial, 1.481 pelabuhan non komersial, dan 800 pelabuhan khusus (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS).

ALKI II dan tantangannya

Di atas sudah dijelaskan bahwa ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-

Lautan Flores-Selat Lombok. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengharapkan agar ALKI II ini bisa menjadi jalur utama perdagangan global. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa ALKI I sudah semakin padat, padahal jalurnya dangkal dan sempit sehingga risiko tabrakannya tinggi. Sedangkan Selat Lombok (ALKI II) merupakan laut dalam, lebih lebar, dan relatif aman (Republika.co.id, 13/6/2016).

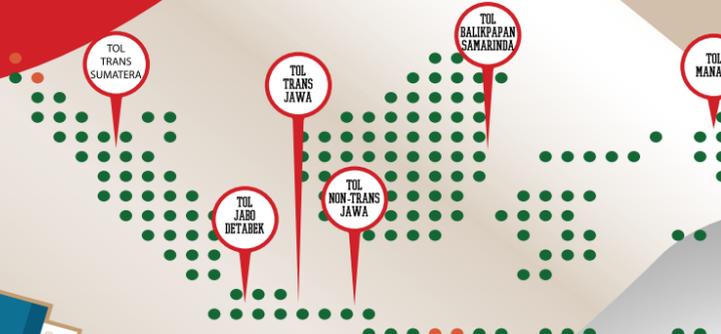
Apabila harapan di atas jadi terlaksana, pembangunan di kawasan Indonesia timur diprediksi akan semakin marak. Banyak fasilitas seperti pemeliharaan, pelayanan dan suplai di berbagai sektor termasuk makanan dan air minum akan berkembang di kawasan ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi pelabuhan laut Balikpapan, Makassar, Banjarmasin, atau Bitung sebagai pelabuhan/terminal petikemas pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan kawasan yang ada.

Selain infrastruktur dasar, tantangan yang perlu memperoleh perhatian ke depan adalah masalah *dwelling time*, reformasi birokrasi, dan masalah koordinasi antara instansi pemerintah. Proses penghapusan berbagai lembaga pemerintah yang tidak efektif dan transformasi dari eselonisasi menjadi fungsionalisasi peran SDM pemerintah perlu terus didorong. Sebab, langkah pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah sekitar ALKI II perlu memperoleh dukungan dan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah secara terpadu dan komprehensif.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA BERTEKAD TURUT MEWUJUDKAN AKSESSIBILITAS DAN KONEKTIVITAS JALAN TOL DI INDONESIA MELALUI PENDANAAN PENGADAAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

- ✓ PENINGKATAN KONEKTIVITAS & AKSESSIBILITAS
- ✓ PENINGKATAN EFISIENSI
- ✓ PERTUMBUHAN EKONOMI/IKLIM INVESTASI
- ✓ PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA



mitra sinergi untuk membangun negeri



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 7 Selatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710, telepon: 021-3449230 ext. 4226, email: info.lman@kemenkeu.go.id



Jatuh Cinta pada Fisika Sejak Remaja

Firman di Oxford.

Foto Dok. Pribadi

Jam telah menunjukkan pukul enam sore, tiga jam sebelum waktu berbuka puasa, ketika Muhammad Firmansyah Kasim dan teman-temannya kembali tiba di Kota Oxford, Jumat (10/6). Firman—biasa dia siapa—tengah sibuk bolak-balik Oxford-Didcot di Inggris untuk melakukan eksperimen yang menjadi bagian program S3 di Departemen Fisika University of Oxford. Bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut, tahun ini adalah Ramadan ketiga di negeri seberang.

Subuh di Inggris dimulai pukul tiga dini hari, sedangkan adzan Maghrib berkumandang sekitar pukul sembilan malam. Bagi Firman, berpuasa selama 18 jam tak terlalu terasa di sela-sela kesibukannya melakukan eksperimen. Lima hari dalam seminggu, Firman melakukan percobaan laser berdaya tinggi yang

ditembakkan ke gas. Setelah ditembakkan, elektron dan inti atom dari gas tersebut akan lepas. “Kumpulan elektron dan inti atom yang terlepas disebut plasma. Unsur plasma itu yang menjadi obyek eksperimen kami,” kata Firman dalam wawancara melalui Skype dengan Media Keuangan, Sabtu (11/6).

Yang hebat, Firman dipilih oleh supervisornya di kampus untuk memimpin eksperimen *plasma wakefield* itu. Di dalam tim, anak bungsu dari empat bersaudara tersebut merupakan satu-satunya mahasiswa Indonesia. Lima orang anggota peneliti lain terdiri atas tiga orang mahasiswa Inggris dan satu orang mahasiswa Amerika Serikat yang sama-sama tengah menempuh S3 serta satu orang peneliti berkebangsaan Perancis yang sedang menyelesaikan *post-doctoral*.

Firman mengungkapkan eksperimen yang dilakukannya dapat digolongkan

dalam kategori *basic science*. Dalam *basic science*, aplikasi yang menjadi hasil eksperimen bukan hal utama. Pemuda kelahiran Makassar, 26 Januari 1991 itu mencontohkan eksperimen gelombang elektromagnetik yang dilakukan oleh para ilmuwan pada periode 1800-an.

Pada saat itu, para ilmuwan tak dapat memperkirakan dengan pasti ujung penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Namun, mereka terus melakukan penelitian. Dua ratus tahun kemudian, Firman bercerita, gelombang elektromagnetik menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. “Aplikasi dari eksperimen *plasma wakefield* bukan hal yang terlalu kami pikirkan. Ekspektasi kami adalah dapat melihat struktur plasma dan menjalankan eksperimen ini tepat waktu,” kata dia. Namun, Firman menambahkan penelitiannya berpotensi dikembangkan

untuk menghasilkan sumber X-Ray dengan intensitas tinggi dalam media berukuran lebih kecil.

Menjadi pemimpin eksperimen dengan anggota yang multikultur diakui Firman tak selamanya mudah. Tantangan komunikasi menjadi salah satu yang utama. Oleh karena itu, Firman banyak melakukan penyesuaian diri. Walaupun sedang berpuasa, tak jarang Firman ikut ke kafetaria saat jam makan siang. “Sebisa mungkin saya ingin lebih dekat dengan anggota tim,” ungkapnya. Beruntung, teman-temannya mengerti ibadah yang sedang dijalani salah satu pengurus Oxford Indonesian Society tersebut. Menurut Firman, Ramadan kali ini tak seberat tahun lalu. Pada 2015, sejumlah negara di Eropa terkena gelombang panas *heatwave*. Hal ini menyebabkan iklim yang sangat kering dan menjadi cobaan tersendiri bagi muslim yang berpuasa.

Jatuh cinta pada fisika

Sejak duduk di bangku SMP, Firman sudah menekuni bidang Fisika. Beberapa prestasi internasional pun pernah diraihinya, antara lain medali emas di *38th International Physics Olympiad*, Juli 2007 di Isfahan, Iran dan medali emas di *Asian Physics Olimpiad* (APHO) di Shanghai, Tiongkok, April 2007. Di samping itu, Firman tergabung dalam tim olimpiade sains di bawah bimbingan Yohannes Surya sejak masih bersekolah di bangku SMP. Karena prestasinya yang bagus, dia kembali masuk dalam tim olimpiade tingkat SMA. “Di situ saya jatuh cinta pada Fisika,” kata Firman.

Selepas SMA, Firman bercita-cita melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Yang menarik,

dia sempat ditolak saat masuk melalui jalur bebas tes untuk pemenang olimpiade tingkat nasional. “Sertifikat yang saya punya berasal dari olimpiade tingkat internasional, sedangkan yang tersedia di ITB jalur untuk pemenang olimpiade tingkat nasional,” ujar Firman. Namun, dia tak menyerah. Ujian saringan masuk reguler di kampus yang sama dijajalnya. Lewat jalur tersebut, Firman akhirnya diterima di Jurusan Teknik Elektro ITB.

Sejak SMP dan SMA, Firman sudah terbiasa tinggal berjauhan dengan orang tua. Banyaknya latihan di pusat pelatihan tim olimpiade mengalihkan kesedihannya berpisah dengan ayah dan ibu. Karena berpengalaman hidup mandiri, ketika harus menempuh studi di Bandung, Firman sudah tak perlu banyak menyesuaikan diri.

Magang di CERN

Setelah lulus dari ITB, Firman berkesempatan magang di *Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire* (CERN) di Jenewa, Swiss. Selain Firman, terdapat dua mahasiswa ITB lainnya yang juga terpilih berangkat ke laboratorium penelitian fisika partikel dan nuklir terbesar di dunia itu. Program magang di CERN diikuti sekitar 250 mahasiswa dari seluruh dunia yang telah melalui seleksi.

Pada bulan Juni–Agustus 2013, Firman menetap di Jenewa. CERN pada saat itu memiliki empat eksperimen utama. Firman dan kedua temannya ditempatkan pada eksperimen yang berbeda. Selama magang, Firman antara lain bertugas membuat *website* untuk memuat data-data eksperimen. “Saya jadi belajar fisika sekaligus *programming* di sana,” kata dia.

Firman termasuk orang Indonesia yang paling awal bekerja di CERN. Saat dia

dan kedua temannya magang, hanya ada satu orang Indonesia yang sedang bekerja di lembaga prestisius itu. Dia adalah Suharyo Sumowidagdo, Peneliti LIPI yang sekaligus menjadi supervisor Firman selama magang.

Periode magang di CERN bersamaan dengan wisuda di ITB. Oleh karena itu, pengagum komedian John Oliver itu mesti merelakan diri tak ikut wisuda. Meskipun sempat bersedih, Firman tak menyesali keputusannya. Seolah menjadi ganti absen dalam wisuda, Firman mendapatkan informasi penerimaan mahasiswa S3 di University of Oxford.

Beasiswa LPDP

Pengalaman di CERN membuka jalan Firman untuk berkuliah University of Oxford. Dari Jenewa, dia kemudian berkoordinasi dengan kakak-kakaknya mengurus syarat-syarat pendaftaran beasiswa LPDP. Kebetulan, kakak ketiganya telah mendapatkan beasiswa yang sama terlebih dahulu. “Kakak-kakak di Makassar banyak membantu, terutama untuk syarat dokumen. Saya mengurus apa yang bisa dilakukan dari Jenewa,” kata Firman.

Di dalam esai, Firman tak lupa menuliskan keinginannya melakukan eksperimen laser, apa yang dikerjakannya di CERN, dan pengalamannya bergelut di dunia Fisika sejak lama. Di Subdepartemen Fisika Partikel, terdapat sebelas mahasiswa S3 seangkatan Firman. Firman adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia di sana. Di samping itu, dia juga menjadi orang Indonesia pertama yang aktif di Lembaga Penelitian Fisika Partikel di *University of Oxford*. Pada jangka panjang, Firman berharap dapat pulang ke tanah air dan mengabdikan diri menjadi peneliti.

Teks Dwinanda Ardhi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Menggali Potensi Pajak di Era Digital

Teks Ragimun, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

Perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat. Sebagian kalangan bahkan menyebut era digital ini mampu mengubah tatanan dunia. Orientasi kebijakan pembangunan pun terus berkejaran dengan berbagai perubahan tersebut. Perilaku masyarakat bergeser menjadi ingin serba cepat. Kebiasaan berbelanja *online* dan melakukan beragam transaksi *online* lainnya saat ini begitu mudah. Bukan saja transaksi dalam negeri, namun transaksi luar negeri pun demikian.

Kita juga tidak asing lagi dengan penggunaan aplikasi digital dari Google Play, Appstore, atau iTunes. Kini, bila seseorang ingin berbelanja, tak perlu lagi bersusah payah pergi ke toko atau pasar, cukup melalui media internet pada telepon pintar. Konsumen pengguna internet sangat dimanjakan karena menghemat tenaga, biaya, waktu, dan bahkan dapat menikmati berbagai pilihan produk. Di sisi lain, dunia perpajakan dibuat pusing dalam menjaring berbagai transaksi elektronik dunia maya tersebut.

Era ekonomi digital menimbulkan harapan sekaligus tantangan besar bagi aparat pajak (fiskus). Transaksi arus barang makin banyak tetapi

sulit dideteksi. Kekhawatiran ini didukung lemahnya infrastruktur teknologi informasi untuk menangkap aktivitas yang merupakan potensi penerimaan pajak. Ditambah lagi, sistem penganggaran APBN saat ini membuat mekanisme pengadaan barang untuk *software* yang *up to date* tersedia paling cepat satu tahun mendatang. Hal ini tentu semakin mempersulit fiskus untuk mengimbangi kecanggihan subyek dan obyek target pajak yang disasar.

Kerja sama bilateral dengan beberapa negara terkait masalah ini menjadi penting. Sudah lama pemerintah memprioritaskan agar *e-commerce* dapat menjadi delik pajak. Namun, perkembangan digital saat ini tidak lagi sederhana *e-commerce*. Perusahaan *daring* asing makin mudah masuk ke negara ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bertahun-tahun korporasi seperti Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Yahoo beroperasi di Indonesia. Namun, keuntungan yang mereka raup malah lari ke perusahaan induk di negara lain. Modus seperti ini akhirnya disadari oleh beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Italia, termasuk Indonesia.

Perancis akhirnya mulai menyoar

pajak dari perusahaan internet besar seperti Google. Perusahaan ini telah meraup omzet lebih dari 30 miliar dollar per tahun dari penjualan iklan. Sebagian dari omzet tersebut berasal dari Perancis sendiri. Namun, karena Google bukan perusahaan Perancis, maka Google tidak membayar pajak pendapatan ke Perancis. Tentu ini tidak adil.

Kejadian serupa juga terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yaitu strategi memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Persoalan ini tidak mudah. Bukan hanya dapat menimbulkan salah tafsir peraturan di negara-negara yang berbeda, namun juga ada perebutan kepentingan antara pemerintah dengan bisnisnya sendiri.

Perlunya Strategi Pemerintah Ada beberapa pertimbangan yang dapat direkomendasikan guna mengatasi masalah ini. Pertama, sudah seharusnya

DJP fokus menyoar perusahaan-perusahaan *daring* sebagai basis pajak. Potensi pajak dari para penyedia layanan dunia maya ini sangat besar. Dengan begitu, semua instrumen mesti dikerahkan. Bandingkan saja dengan kebijakan pemerintah Inggris yang menjadikan Google sebagai Bentuk Usaha Tetap sehingga pajaknya meningkat dari hanya GBP1,3 juta menjadi GBP130 juta.

Di Indonesia, saat ini pihak Google sudah berkontribusi sebagai pembayar pajak. Namun, hanya sebatas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari karyawan Google. Sementara pajak atas PPh badan Google tidak terdeteksi. Demikian pula dengan banyak perusahaan *daring* lainnya. Sebut saja Yahoo, WhatsApp, Instagram, Line, Facebook dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia bersama

negara-negara anggota G20 lainnya juga harus proaktif bekerja sama dengan OECD untuk membahas BEPS dan cara-cara penanggulangannya. Untuk itu, pemerintah perlu terus menyampaikan usulan agar regulasi perpajakan yang disusun bersifat fleksibel. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di setiap negara.

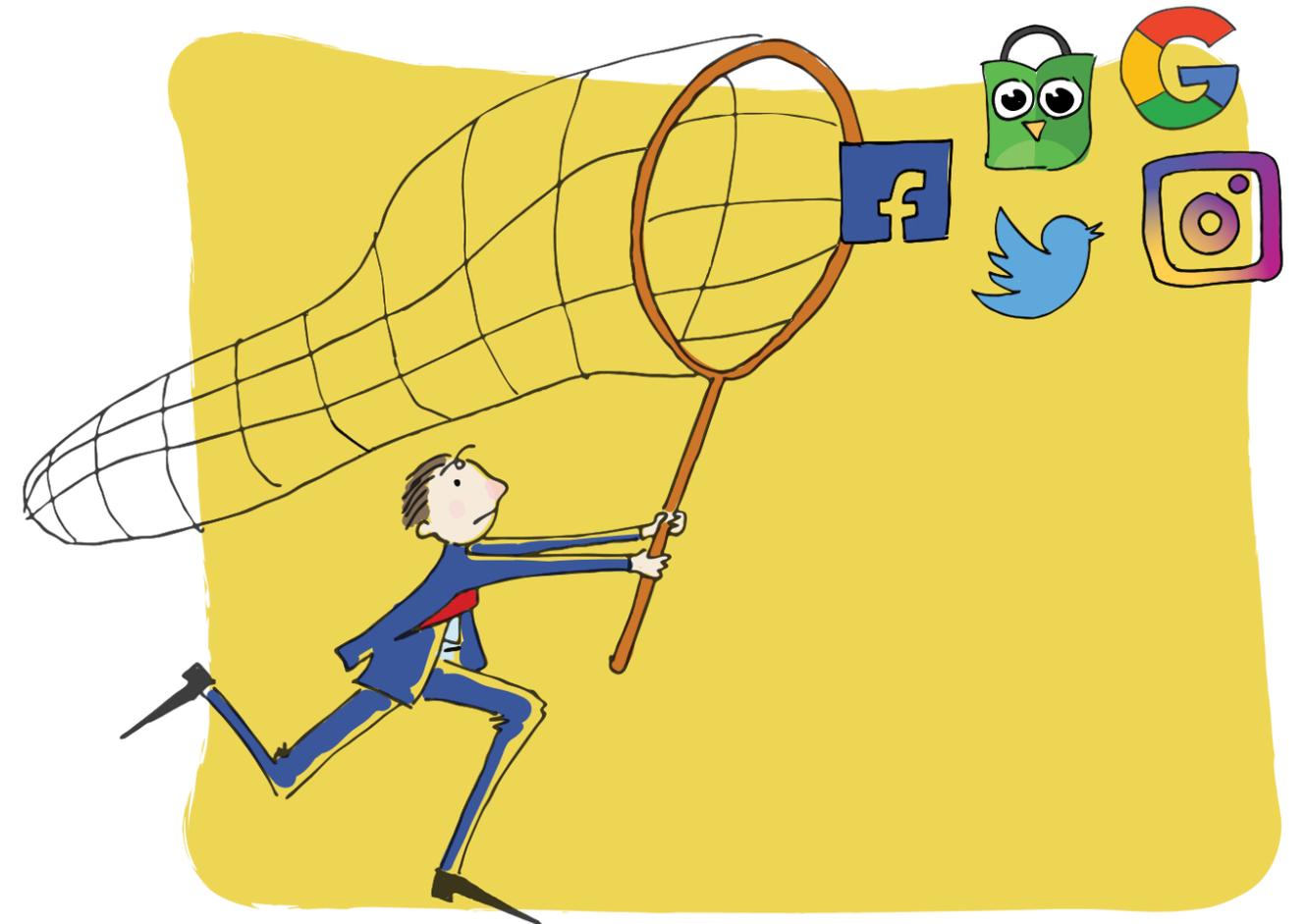
Kedua, pemerintah juga perlu menyusun peraturan yang membatasi akses perusahaan luar negeri untuk memperoleh keuntungan sepihak dari Indonesia. Misalnya saja dengan melakukan seleksi dan pembatasan beberapa situs luar negeri seperti yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Google.

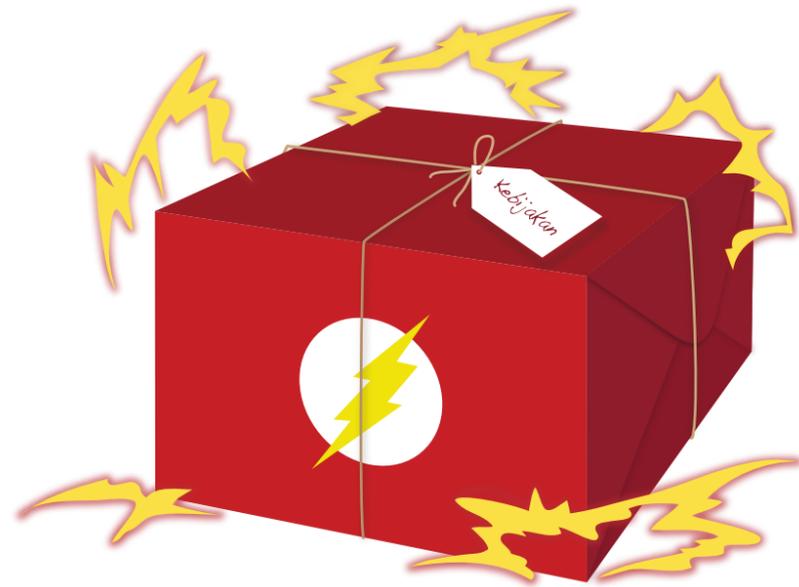
Selain itu, diperlukan juga

pengembangan *National Payment Gateway* (NPG) untuk mengawasi transaksi apapun termasuk perdagangan *ecommerce*. Kemudian, disusul dengan penyempurnakan ketentuan perencanaan perpajakan yang akurat dan anti penghindaran pajak secara spesifik dan rinci.

Ketiga, perlu payung hukum yang memberikan ruang dan kewenangan kepada aparat pajak untuk mendalami sumber-sumber obyek pajak potensial serta menindak para pengemplang pajak. Langkah kongkrit DJP yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang intens dengan beberapa pihak, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait keterbukaan data.

Ilustrasi
Arfindo Briyan





Deklarasi Inisiatif Percepat Implementasi Paket Kebijakan

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Dalam rangka memberikan aspek keadilan bagi importir, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi sektor perdagangan serta mempercepat implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah khususnya yang terkait dengan kepabeanan. Deklarasi inisiatif merupakan pemberitahuan oleh importir dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) guna memperkirakan harga yang seharusnya dibayar, dan/atau biaya-biaya, dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB.

Nilai Pabean

Esensi dari kebijakan deklarasi inisiatif adalah agar importir mencantumkan nilai pabean yang tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean, termasuk biaya dan/atau nilai yang harus ditambah pada nilai transaksi sepanjang belum dimasukkan dalam harga yang sebenarnya dibayar.

Apabila nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, diberikan beberapa alternatif perhitungan, yaitu berdasarkan nilai transaksi dari barang identik, nilai transaksi dari barang serupa, penggunaan metode deduksi, atau penggunaan metode komputasi. Apabila melalui beberapa alternatif tersebut nilai pabean masih tidak dapat ditentukan, digunakan alternatif tata cara yang wajar dan konsisten berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995, ditegaskan pengaturan perhitungan yang tidak menggunakan nilai transaksi dan metode yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan, maka diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Terkait hal ini, PMK Nomor 67/PMK.04/2016 mengatur penghitungan nilai pabean dengan menggunakan deklarasi inisiatif dalam pengajuan PIB, khusus untuk transaksi harga *futures*, royalti, dan atau *proceeds*.

Futures, Royalti, dan Proceeds

Bisnis internasional yang diatur dalam deklarasi inisiatif merupakan transaksi berjangka pada bursa komoditas yang menggunakan harga *futures*, royalti, dan/atau *proceeds*. *Futures* merupakan harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. Sementara royalti merupakan biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, *proceeds* adalah nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak

langsung kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor.

Apabila importir menggunakan fasilitas deklarasi inisiatif, maka sesuai aturan dalam PMK ini, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi importir. *Pertama*, pada saat penyampaian PIB, importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor dengan harga *futures* atau yang mengandung royalti/*proceeds*, perkiraan harga *futures* atau nilai royalti/*proceeds*, serta tanggal penyelesaian (*settlement date*) harga *future* atau nilai royalti/*proceeds*. Terkait hal ini, tanggal penyelesaian harga *futures* paling lambat 45 hari, sedangkan royalti/*proceeds* paling lambat satu tahun sejak tanggal pendaftaran PIB.

Kedua, importir harus memenuhi tiga kewajiban pada saat *post clearance*. Kewajiban pertama, melakukan pembayaran inisiatif atas kekurangan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar. Kewajiban kedua, menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada Kantor Bea Cukai tempat pemasukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembayaran inisiatif. Kewajiban ketiga, menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif untuk keperluan audit kepabeanan.

Audit kepabeanan menjadi sarana pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif. Pembayaran inisiatif tidak berlaku jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif. Kecuali, bagi importir yang telah mengajukan PIB

sebelum tanggal berlakunya PMK ini dan belum dilakukan penetapan kembali oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Penutup

Selama ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melaksanakan fungsinya dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pemberian beragam fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Fasilitas dimaksud berupa dukungan bagi industri, serta pencegahan dan pengawasan atas masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi karena dapat menimbulkan efek negatif bagi keamanan masyarakat dan negara. Pengaturan deklarasi inisiatif atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk juga menjadi fungsi DJBC sebagai pendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam hal fasilitasi perdagangan.

Kebijakan deklarasi inisiatif diharapkan dapat mendukung paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah terkait kepabeanan. Hal ini juga sejalan dengan praktik bisnis internasional yang memiliki sejumlah komponen pembentuk harga barang dengan besaran nilai yang belum diketahui secara pasti pada saat penyampaian dokumen pabeanan. Padahal, nilai tersebut menjadi dasar dalam penghitungan bea masuk, sehingga kebijakan khusus terkait hal ini diperlukan. Selain dapat mengakomodasi hal tersebut, peraturan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan, serta memberikan kepastian hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan pabeanan.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Budi Sulistyono



Membumikan APBN

APBN bukanlah hal sulit untuk dimengerti. Dengan metode yang menyenangkan, kini, siswa sekolah menengah atas mulai diberikan pemahaman dasar mengenai seluk beluk perencanaan keuangan negara.

Siswa berseragam abu-abu itu berbicara dengan penuh semangat di depan kelas. Ia menjawab tantangan untuk menyampaikan pendapatnya dengan tema “Andai aku menjadi Menteri Keuangan”. Seluruh kelas menyambut orasi singkatnya dengan tepuk tangan riuh. Pada kesempatan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi topik hangat dan ringan yang diperbincangkan oleh para siswa dan guru.

Itulah sekelumit kisah dari rangkaian acara DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) Menyapa yang digagas oleh Direktorat Penyusunan APBN, DJA. Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN, Wawan Sunarjo, menjelaskan awal mula teretusnya ide program ini. DJA Menyapa merupakan salah satu program unggulan yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2015.

Dalam ajang yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 tersebut, DJA Menyapa menyabet Juara VI. Tak menjadi pemenang utama bukan berarti menyurutkan semangat segenap

tim DJA Menyapa. Mereka berbangga hati dengan programnya yang implikatif. Wawan, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa tujuan DJA Menyapa ini yaitu untuk membumikan APBN. Membumikan APBN berarti memperkenalkan APBN secara luas dengan cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Sasaran utama DJA Menyapa adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) beserta para guru.

Serunya mengenal APBN

SMA di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi *pilot project* program ini. SMA 1 Bojonggede di Bogor terpilih menjadi sekolah pertama diselenggarakannya program DJA Menyapa pada November 2015 lalu. Di luar perkiraan, antusiasme para siswa dan guru ternyata sangat luar biasa. Banyaknya pertanyaan kritis dan respon aktif para siswa membuat suasana pembelajaran APBN menjadi jauh dari kesan membosankan. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya mengenai APBN, namun juga terkait utang negara, anggaran pendidikan, dan dana desa.

Tak bisa dipungkiri, mengajari para siswa mengenai APBN dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami menjadi tantangan tersendiri bagi perwakilan DJA. Untuk kelancaran acara, jauh-jauh hari tim DJA Menyapa telah mempersiapkan diri dengan matang. Bukan hanya persiapan pendalaman materi, namun juga pematangan kemampuan berbicara di depan umum.

“Para pegawai kebanyakan jenuh setelah menjalankan rutinitas menyusun Nota Keuangan di bulan Agustus. Program DJA Menyapa sangat bermanfaat untuk menyegarkan pikiran dalam mendukung pekerjaan. Selain bisa *refreshing* di luar (tidak bekerja di ruang kantor), pegawai

juga bisa meningkatkan kapasitas dengan mempelajari lagi ilmu tentang APBN, RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), dana desa, pembiayaan, dan sebagainya,” jelas Wawan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penyusun Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat, Agung Lestanto, mengungkapkan bahwa perwakilan tim DJA Menyapa di lapangan sangat dituntut rasa kreativitasnya. “Mereka hanya dibekali substansi materi. Penyampaiannya bebas melalui metode apa saja, yang penting pesan APBN tersampaikan,” tuturnya. Ternyata tim DJA Menyapa benar-benar menyampaikan materi dengan metode yang sangat variatif. Tidak melulu bermodalkan tayangan materi saja, tapi juga dengan kuis, permainan bertema APBN, hingga simulasi.

Semangat tinggi para siswa

Minimnya pengetahuan para siswa mengenai APBN membuat mereka antusias menerima informasi dari tim DJA Menyapa. Para siswa yang sebagian besar adalah murid kelas XI ini diberikan pengetahuan tentang seluk-beluk APBN, mulai dari sejarah anggaran, postur, hingga siklus APBN. Tak hanya itu, para siswa juga terinspirasi oleh beberapa pegawai DJA yang telah mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri.

Para siswa juga semakin semangat mengikuti acara saat melakukan simulasi “Jika kalian menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk menyusun APBN, program apa yang akan menjadi prioritas?” Para siswa berlomba-lomba memberikan pendapatnya. Beragam jawaban pun muncul. Sebagian menjawab infrastruktur, ada pula yang menjawab pendidikan, dan sebagainya.

Misi yang diusung tim DJA Menyapa untuk memperkenalkan APBN dinilai sangat efektif. Antusiasme juga dirasakan di lingkungan DJA. Permintaan sebagai sukarelawan tim DJA Menyapa juga tak sedikit yang berasal dari luar Direktorat Penyusunan APBN. Diakui Wawan, kesuksesan program ini memberikan tantangan tersendiri. “Ke depan, kami ingin segala kegiatan DJA di luar kota, seperti sosialisasi, bimbingan teknis RKAKL, atau *workshop* bisa ditambahkan satu hari. Satu hari itu digunakan untuk menyelenggarakan acara DJA Menyapa dalam rangka sosialisasi APBN di kalangan siswa SMA,” ujar Wawan penuh semangat.

Ada satu cerita unik saat tim DJA Menyapa mengunjungi kota Kediri. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Data dan Informasi APBN, IGA Krisna Murti Rs, menegaskan bahwa pihak sekolah meminta tambahan kuota peserta. DJA tidak bisa menyanggupi karena dana yang terbatas. Akhirnya sekolah berinisiatif memberi tambahan konsumsi untuk acara tersebut. “Rencananya hanya menggunakan satu kelas untuk acara, akhirnya satu aula besar yang digunakan untuk menampung para siswa. Kami sangat mengapresiasi semangat pihak sekolah,” jelas Krisna Murti.

Program ini sungguh memberikan manfaat yang luar biasa bagi kedua belah pihak, yakni DJA sebagai penggagas acara dan para siswa sekolah beserta guru sebagai peserta. Tim DJA Menyapa yang ditugaskan merupakan para alumnus sekolah tersebut. Ibaratnya, program sosialisasi ini merupakan ajang kembalinya alumni untuk membagikan ilmu kepada almamaternya. Saat ini sudah beberapa kota yang menjadi tuan rumah DJA Menyapa, seperti Jabodetabek, Bandung, Cimahi, Semarang, Yogyakarta, Pemalang, Mojokerto, Bone, Medan.

Teks Pradany Hayyu

Pandai Beropini



Saat membuka layar ponsel, seorang ibu membaca serang opini yang terjadi di dunia maya: fenomena ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Lelah dengan adu argumen yang ada, dia meletakkan ponselnya. Teringat janjinya dengan sang balita pagi tadi untuk bisa segera pulang ke rumah selesai bekerja.

Hari ini adalah hari pertamanya masuk bekerja. Kepergian sang suami memaksanya untuk melepas statusnya sebagai ibu rumah tangga. Kini, dia harus bangun lebih pagi dan tidur lebih sedikit demi mempersiapkan segala keperluan anaknya sebelum bekerja. Saat membaca beragam pendapat di media, dia tersenyum. Ada getir di sana. Terlebih saat matanya tertuju pada satu komentar pedas tentang ibu bekerja. Bukan tentang isinya, tetapi karena namanya jelas tertulis di sana, sebagai si pemberi komentar.

Pada era keterbukaan kini, setiap orang disuguhi dengan beragam informasi. Tidak hanya itu, ada beragam ide dan opini yang mengisi ruang publik kita. Semakin mudahnya kita memperoleh akses terhadap informasi, nyatanya tidak selalu membuat kita menjadi lebih pintar. Banjirnya informasi tidak jarang hanya berdampak pada mudahnya kita *menjudge* sesuatu, berdasarkan kacamata kita. Fenomena yang terjadi belakangan adalah ramainya setiap diri menilai orang lain. Ruang-ruang publik disesaki beragam penilaian mengenai banyak hal. Setiap orang bebas memberikan opini dan pendapat. Tidak sedikit yang tiba-tiba menjadi pakar, menentukan tentang mana yang benar dan mana yang salah tanpa melihat cerita yang ada di sebaliknya. Alih-alih memberikan solusi, justru menimbulkan perselisihan bahkan kepada mereka yang secara fisik tidak sekalipun pernah kita temui.

Padahal dalam hidup, ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui secara kasat mata. Ada kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Foto
www.wcdvs.
org.au

Tidak tepat kiranya, bila kita mengukur kaki orang lain dengan sepatu yang kita miliki. Ada banyak ukuran yang tidak bisa kita paksakan. Ada prinsip dan nilai yang juga berbeda pada masing-masing orang.

Dengan demikian, memberikan *judgement* atas pilihan yang diambil orang lain sama halnya dengan memaksakan ukuran sepatu kita kepada orang lain. Oleh karena itu, tahanlah diri kita untuk tidak dengan mudah berkomentar. Sebab ada hal-hal yang memang layak untuk dikomentari, tapi ada yang lebih layak untuk kita jadikan bahan introspeksi. Menyibukkan diri dengan lebih banyak menilai diri sendiri adalah lebih utama dibandingkan sibuk mengomentari pilihan yang diambil oleh orang lain, apalagi tanpa memberikan solusi.

Kini, pada setiap kondisi yang terjadi di luar kita, mari lebih bijak beropini. Sebab kita tidak pernah tahu, apa rencana Tuhan pada diri kita suatu saat nanti. Hingga kita baru tersadar saat takdir mencandai kita dengan kenyataan yang memaksa kita untuk mengambil pilihan yang berbeda dari apa yang kita yakini sebelumnya.

Teks Farida Rosadi



Judul:
5W1H: Kisah Dian Sastro dan Onlinepreneur Lainnya
Pengarang:
Yoris Sebastian
Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama
Kota Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2016
Deskripsi Fisik:
131 halaman
ISBN:
9786020324838

Bekerja dengan semangat kreativitas dan inovasi menjadi modal utama bagi siapapun yang ingin bertahan menjadi pengusaha sukses. Berbagai pola bisnis telah banyak diceritakan orang lain dalam seminar ataupun buku kiat-kiat meraup untung lebih dari usaha yang dijalankan. Seorang *creative junkies* Yoris Sebastian dengan ciri khasnya hadir membant u para pembaca untuk mengenal dirinya sendiri lewat pertanyaan 5W1H, sebelum mereka menentukan bisnisnya. Rumus yang digunakan ini berbeda dari 5W1H pegangan wartawan dalam penulisan berita yaitu *Who Am I, What Am I Offering, Why Does It Matter, Whom Are We Talking To, When Is The Right Time, dan How To Attract Customer*.

Buku ini lahir dari testimoni yang disampaikan oleh para pembaca dan modul yang telah disempurnakan dari berbagai *workshop* di berbagai kota besar di Indonesia. Penulis membuat format buku ini sangat menarik untuk dipraktikkan langsung oleh pembaca dengan metode 5W1H. Para pembaca

seolah sedang berada di dalam kelas dan mengikuti *workshop* yang diadakan penulis. Mengambil cerita kesuksesan 5 *onlinepreneur* (3 Skinny Minnies, Cotton Ink, KDRI, Kulkit, dan Wi-Ka Souvenir) di bisnis masing-masing, Yoris mengandalkan perjalanan hidupnya untuk menciptakan ide-ide baru dalam menentukan metode yang tepat untuk membeberkan jurus sukses bisnis online mereka dari sudut pandang 5W1H.

Nuansa kekinian penggunaan teknologi berbisnis *online* hadir dalam metode yang disajikan; seperti fitur *virtual shot*, fitur *video collage*, fitur *scroll capture*, *webstore*, sosial media, *grup messaging application*, dan masih banyak fitur menarik dari hasil kecanggihan *smartphone* yang ada dalam genggamannya kita untuk memperlihatkan *sample* produk yang dijual. Penulis sangat rinci hingga mudah sekali kita langsung mencoba fitur-fitur tersebut sambil meneruskan untuk membaca bab selanjutnya.

Walaupun ringkas dan dominan penyajian secara visual, bukan berarti mengurangi esensi dan alur penyusunan dalam buku ini. Kemasan buku sangat kreatif dengan ilustrasi gambar mewakili metode-metode yang diberikan. Cover buku dominan oleh warna putih, sepertinya penulis ingin sekali pembaca dapat ikut serta ambil bagian dalam proses kreatif di buku ini. Buku ini wajib dibaca bagi siapa saja yang mencari *passion* dalam berbisnis dari sudut pandang berbeda. Karena sesuatu yang berasal dari *passion* akan melahirkan ide-ide baru yang akan bermanfaat bagi orang lain. Hampir semua orang yang sukses berbisnis pribadi biasanya dimulai dari sesuatu yang memang sudah ada dalam dirinya atau sekitarnya. Kita hanya perlu sedikit sesnsitif mengenali bakat yang dimiliki.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu

Perpustakaan Kementerian Keuangan

@kemenkeuilib

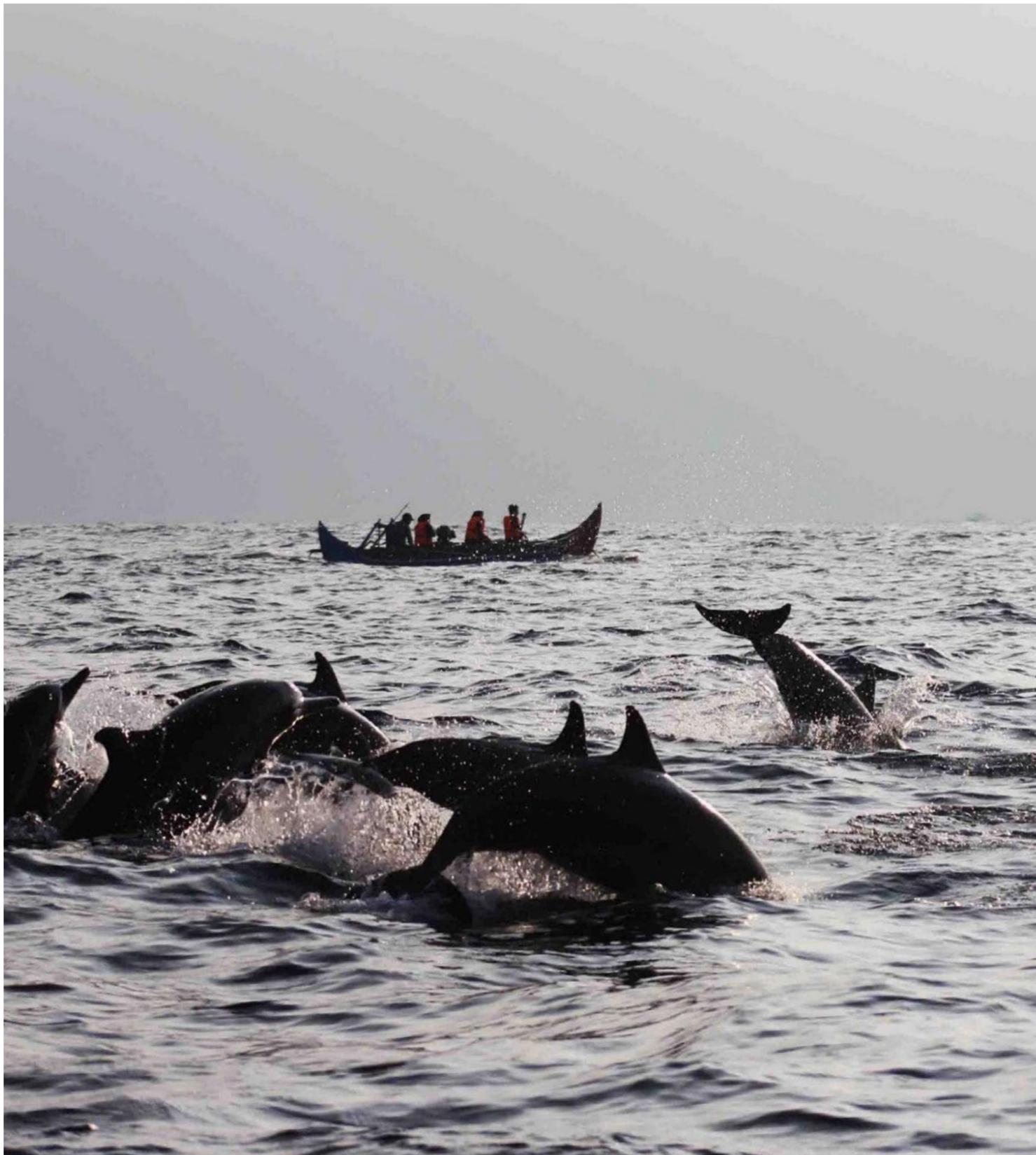
www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 **Supernova: Inteligensi Embun Pagi**
Dee Lestari
- 2 **Lost: Pencarian di Bulan Agustus**
Rizal Affif
- 3 **O**
Eka Kurniawan
- 4 **Hujan di Bulan Juni**
Sapardi Djoko Darmono
- 5 **TAN**
Hendri Teja

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 **Reinventing: Semua Berawal Dari Energi, Ia Menghidupkan, Mengancam, dan Mengubah Hidup Kita**
Rhenald Kasali
- 2 **5W1H: Kisah Dian Sastrowardoyo dan Onlinepreneur Lainnya**
Yoris Sebastian
- 3 **Bagaimana Perekonomian Tumbuh dan Mengapa Runtuh**
Peter D. Schiff
- 4 **Fusion Leadership: Harmoni Dua Dunia**
Nenny S.
- 5 **Structural Equation Modeling (SEM)**
Haryadi Sarjono



Mengejar Lumba-Lumba di Teluk Kiluan

Jika suatu saat Anda melihat peta provinsi Lampung, di tanjung-tanjung sepanjang Selat Sunda Anda akan menemukan sebuah tempat bernama Teluk Kiluan. Tempat ini biasanya ditandai dengan gambar lumba-lumba. Sejak awal 2013, Teluk Kiluan telah menjadi objek wisata pantai yang populer di kalangan anak muda, bahkan yang berasal dari daratan Jawa. Meski fasilitas yang ada masih sangat minim, namun tak menyurutkan minat pelancong untuk berlibur ke sana.

Teluk Kiluan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan dan bisa ditempuh dalam waktu kurang dari tiga jam dari kota Bandar Lampung. Jaraknya hanya 90km dari pusat kota, namun sayang jalan menuju ke sana masih jelek dan berbatu-batu. Kami bersembilan berangkat pukul 10.00 dari ibukota provinsi dan tiba di penginapan pukul 14.00 setelah hampir setengah jam menempuh jalur yang salah pasca persimpangan antara Kiluan dan Way Suka. Petunjuk arahnya kecil sekali, hampir tak terlihat.

Cottage yang kami huni dikelola oleh penduduk setempat. Bentuknya seperti rumah panggung dari bambu dan terletak persis di tepi pantai. Agak sulit mencari warung makanan di Teluk Kiluan. Namun,

sarapan, makan siang, makan malam, dan makanan kudapan disediakan oleh pemilik cottage, sudah sepaket dengan biaya sewa. Tentu saja, ikan jadi santapan utama kami siang dan malam.

Tempat pertama yang kami kunjungi adalah laguna. Sekitar pukul 15.30, bersama seorang pemandu, kami menanjaki dan menuruni bukit selama hampir 30 menit untuk mendatangi hamparan pantai yang masih asri dan bersih. Saya yang sehari-hari hanya berlutut dengan berkas-berkas kantor sampai kalap dibuatnya. Kami berlari-lari menyongsong ombak, berbasah-basahan, dan tentu saja heboh minta difoto saat melompat terjun ke air. Laguna yang datang kami letaknya beberapa meter dari pantai. Untuk menuju ke sana jangan lupa mengenakan alas kaki karena Anda harus memanjat bebatuan karang yang licin dan terjal.

Daya tarik utama Teluk Kiluan adalah lumba-lumbanya. Untuk melihat lumba-lumba berloncatan dilaut, kami harus datang subuh-subuh. Itu sebabnya kami memilih menginap daripada pergi pagi pulang sore. Lumba-lumba muncul di pagi hari. Sebab itu, sebaiknya segera berangkat pagi sekali. Bahkan jika berangkat jam 5 subuh ke laut bersama nelayan sudah

dianggap terlambat.

Lebih-kurang 45 menit kami membelah teluk menuju laut baru mendapati lumba-lumba yang sesungguhnya malu-malu tapi giat berlarian dan berpacu dengan perahu kami. Sulit untuk memotret atau merekam mereka saat timbul di permukaan. Jangan bayangkan mereka berlompatan layaknya di film *Free Willy*. Mereka hanya menyembulkan sedikit sirip punggung ke permukaan air.

Hal yang paling menyenangkan sebenarnya adalah perjalanan kami di perahu untuk menuju titik-titik yang ada lumba-lumbanya. Di sana, banyak perahu yang wisatawan lain yang ikut berlayar ke laut sehingga jika terdengar teriakan histeris di perahu lain yang melihat lumba-lumba. Kami pun membelokkan arah perahu ke sana. Seru sekali.

Saat matahari mulai terik, kami menyeberang ke pulau untuk *snorkeling* melihat terumbu karang, berenang, dan main pasir di pantai. Seperti biasa, anak kota yang jarang melihat pantai akan membuat apa saja yang ditemui di pantai menjadi mainan yang seru. Kami menimbun diri dalam pasir, menulis-nulis di pasir, bermain dengan cangkang kerang, dan juga berjemur.

Foto
@hafiztravoll

Teks Akbar Saputra

Memaknai Hari Lahir Pancasila

Foto
lin Kurniati



Dimata Alfito Deannova Gintings, keputusan Presiden atas penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila tidak menjadi lebih berarti jika semata-mata berupa selebrasi kosong. Hari Lahir Pancasila harus dimaknai dan dirayakan dengan nuansa positif yang sama seperti saat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.

“Harus ada prakarsa positif yang kita lakukan untuk Pancasila sehingga benar-benar mendarah daging bukan sekedar menjadi slogan saja. Jangan sampai seperti perayaan 1 Mei sebagai *May day* - Hari Buruh, publik hanya mengingat aksi demonstrasi besar-besaran,” katanya.

Pria kelahiran Jakarta, 17 September 1976 ini mengenal Pancasila sejak zaman pemerintahan Orde Baru. Kala itu, masyarakat diberi pemahaman mengenai Pancasila dalam penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sejak duduk dibangku sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Sayangnya, Fito - panggilan akrabnya, melihat apa yang diajarkan saat penataran tidak terjadi pada kehidupan yang sebenarnya. “Demokrasi tidak ada. Kesenjangan terlihat. (bahkan) Ada represi kekuasaan terhadap publik. Lalu (era selanjutnya), Pancasila menjadi sekedar simbol yang kita lupakan. Sampai akhirnya setelah era reformasi 98 kita baru sadar (bahwa) Pancasila harus kita maknai lagi.”

Lelaki yang menjadi presenter CNN Indonesia News Report ini menilai bahwa Pancasila masih dianggap sebagai sesuatu yang formal hingga kini. Karena itulah, lulusan pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini berinisiatif agar pemerintah menggaungkan slogan ‘Indonesia ber-Pancasila’. Caranya, tutur Fito, dengan mulai menerapkan prinsip Ketuhanan, prinsip pluralisme, serta prinsip lain yang terkandung dalam butir-butir Pancasila.

Selain itu, mantan *news anchor* Metro TV ini juga mengajak agar seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit dan tidak lagi bergantung kepada siapapun. “Harus mulai percaya bahwa tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri sendiri. Jangan berharap pada orang lain. Setiap individu harus mengoptimalkan potensi yang ada, jangan menunggu pemerintah *ngasih* program apa,” tegasnya.

Terakhir, suami dari Rencany Indra Martani berharap agar sumber daya alam tanah air yang melimpah ini dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Fito sadar bahwa jumlah pengusaha di negeri ini baru sekitar 2 persen, padahal jumlah WNI mencapai sekitar 250 juta jiwa. Untuk itu, menurut Fito, harus ada kesadaran bahwa anak-anak harus mulai dibentuk menjadi pengusaha bukan sekedar lulus sekolah kemudian bekerja pada orang lain.

Teks lin Kurniati



Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMD



HARI BERGANTI..
HATI BERGANTI..

SELAMAT IDUL FITRI 1437 H
MOHON MAAF LAHIR & BATIN



photo: Agus Tri / Biro KLI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA